



BAB III

BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA TAHUN 2022: MENJAGA STABILITAS DAN MOMENTUM PEMULIHAN EKONOMI

Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan dan memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam kerangka bauran kebijakan nasional untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas. Dalam kaitan ini, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*), sedangkan 4 (empat) instrumen lainnya, yakni kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau diarahkan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (*pro-growth*). Sinergi kebijakan tersebut dalam perkembangannya mampu mendorong berlanjutnya momentum pertumbuhan dan menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah perkembangan ekonomi global yang kurang menguntungkan.

Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan pada 2022, yang terus disinergikan dengan arah kebijakan nasional untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan yang terdiri dari “satu jamu pahit dan empat jamu manis” guna merespons risiko meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat pengetatan kebijakan moneter di negara maju, terutama Amerika Serikat (AS), di tengah ekonomi Indonesia yang masih berada pada tahap awal pemulihan ekonomi. Untuk itu, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*), sedangkan 4 (empat) instrumen lainnya, yakni kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pengembangan pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (*pro-growth*).

Pokok-pokok bauran kebijakan Bank Indonesia yang telah diimplementasikan pada 2022 ialah sebagai berikut:

i. Di bidang moneter, kebijakan likuiditas, nilai tukar, dan suku bunga diarahkan untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi.

Ketiga kebijakan tersebut ditempuh oleh Bank Indonesia secara komprehensif dan tersinergi dalam mengimplementasikan arah dan *stance* kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas. Dengan kata lain, *stance* kebijakan moneter yang ditempuh tidak hanya diukur melalui perubahan kebijakan suku bunga, namun juga kebijakan likuiditas. Kelaziman penggunaan kebijakan suku bunga dan likuiditas tersebut juga dapat dilihat dari praktik bank sentral di dunia dalam *exit policy strategy* yang tidak hanya bergantung pada satu jenis kebijakan saja, meskipun memang pilihan prioritas strategi kebijakan moneter yang diutamakan tidaklah seragam. Beberapa negara, terutama yang memiliki eksekusi likuiditas besar, terindikasi lebih mendahulukan normalisasi likuiditas ketimbang kenaikan suku bunga, sedangkan di negara yang memiliki tekanan inflasi tinggi, cenderung mendahulukan peningkatan suku bunga. Dalam konteks ini, sejalan dengan tekanan inflasi inti yang masih rendah terutama pada semester I 2022, maka respons kebijakan moneter ditempuh dengan melakukan normalisasi likuiditas secara *well-calibrated*,

well-planned, dan *well-communicated* melalui kenaikan bertahap rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah menjadi 9% untuk Bank Umum Konvensional (BUK) serta 7,5% untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Kebijakan tersebut ditempuh agar Bank Indonesia tidak *behind the curve* dalam merespons dampak ketidakpastian pasar keuangan global terhadap stabilitas makroekonomi. Stabilisasi nilai tukar juga diperkuat dengan melakukan *triple intervention*, di pasar *spot*, DNDF, dan pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder. Sementara itu, suku bunga kebijakan BI7DRR dinaikkan sebesar 200 bps sejak Agustus 2022 hingga Desember 2022 menjadi 5,50% untuk merespons kenaikan tekanan inflasi inti dan ekspektasi inflasi ke depan.

ii. Relaksasi kebijakan makroprudensial yang tersinergi dengan paket kebijakan terpadu KSSK juga terus ditempuh untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia telah meningkatkan insentif bagi bank yang menyalurkan kredit kepada sektor prioritas dan UMKM dan/atau memenuhi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dalam bentuk pelonggaran atas kewajiban GWM Rupiah serta memperluas cakupan sektor prioritas yang mendapat insentif tersebut. Relaksasi kebijakan makroprudensial tersebut makin memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif lainnya, termasuk kebijakan *Countercyclical Capital Buffer (CCyB)*, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Konvensional dan Syariah, dan Rasio *Loan to Value/ Financing to Value (LTV/FTV)* Kredit/Pembiayaan Properti yang tetap longgar.

iii. Penguatan kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi digitalisasi yang inklusif terus dilakukan. Penguatan tersebut termasuk melalui: (i) perluasan penggunaan QRIS; (ii) intensifikasi program elektronifikasi melalui digitalisasi program bantuan sosial (*bansos*) pemerintah, elektronifikasi layanan Pemerintah Daerah khususnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan integrasi moda transportasi; (iii) penguatan implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) dengan mendorong percepatan adopsi SNAP

bagi bank dan lembaga selain bank (LSB), serta memberikan alternatif penyediaan infrastruktur sesuai dengan kapasitas peserta; (iv) akselerasi implementasi BI-FAST melalui peningkatan kepesertaan, perluasan layanan, serta akseptasi pemanfaatan BI-FAST; serta (v) kebijakan *pricing* sistem pembayaran untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

- iv. **Tiga kebijakan utama di atas juga ditopang sinergi erat Bank Indonesia dengan Pemerintah, perbankan, dan institusi lainnya untuk melanjutkan dukungan pengembangan UMKM serta ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.** Pendalaman pasar valas dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah serta perluasan instrumen lindung nilai. Fasilitasi perdagangan-investasi antarnegara termasuk melalui perluasan penggunaan *Local Currency Transactions* (LCT) juga terus diakselerasi. Kebijakan internasional terus diperkuat melalui perluasan kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait, serta bersama Kementerian Keuangan menyukseskan 6 (enam) agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022.

Bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut juga diperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk untuk mengakselerasi vaksinasi dan pembukaan sektor prioritas ekonomi nasional sebagai prasyarat pemulihan ekonomi nasional. Sinergi kebijakan yang erat antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan KSSK, dalam mendorong akselerasi vaksinasi pada 2022 telah memungkinkan pelonggaran restriksi mobilitas masyarakat dan ekonomi yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi pada 2022. Akselerasi vaksinasi oleh Pemerintah, yang didukung pula oleh pembiayaan dari Bank Indonesia, telah mewujudkan tercapainya *herd immunity* di Indonesia pada triwulan II 2022 dan juga pelaksanaan vaksinasi *booster* yang pada Oktober 2022 telah mencapai 40% dari target. Perkembangan vaksinasi yang sangat positif, tingginya tingkat imunitas penduduk Indonesia,

dan makin terkendalinya penyebaran Covid-19 menjadi dasar yang kuat bagi Pemerintah untuk terus melonggarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), bahkan mencabut kebijakan PPKM pada penghujung Desember 2022. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah juga terus membuka sektor-sektor prioritas ekonomi sehingga mendorong peningkatan mobilitas masyarakat dan ekonomi serta perbaikan ekonomi Indonesia dan prospeknya ke depan. Di samping itu, kebijakan tersebut juga didukung oleh penguatan koordinasi dan sinergi kebijakan KSSK dalam memberikan insentif fiskal, moneter, makroprudensial, dan mikroprudensial kepada sektor-sektor prioritas. Tidak hanya itu, cakupan sektor prioritas yang mendapat insentif kebijakan juga diperluas dari 38 sektor prioritas menjadi 46 sektor prioritas untuk makin mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Berbagai koordinasi dan sinergi kebijakan tersebut mampu mendukung berlanjutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 5,72% (yoy) pada triwulan III 2022.

Koordinasi fiskal dan moneter juga terus diperkuat untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas, termasuk melalui partisipasi Bank Indonesia dalam pendanaan APBN melalui pembelian SBN dari pasar perdana sebagai pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2020. Dari sisi stabilitas harga, guna memitigasi dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap inflasi dan daya beli masyarakat, Pemerintah telah meningkatkan alokasi subsidi dan dana kompensasi energi dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun pada 2022. Arah kebijakan fiskal sebagai *shock absorber* tersebut mampu menahan kenaikan inflasi di Indonesia pada 2022 tidak setinggi kenaikan inflasi di berbagai negara lainnya. Dengan demikian, respons kebijakan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI7DRR) juga tidak setinggi negara-negara lainnya, baik di negara maju seperti AS, Eropa, dan Inggris, maupun negara berkembang termasuk Brazil, India, dan Filipina. Di samping itu, Bank Indonesia pada 2022 juga telah mendukung pembiayaan APBN sebesar Rp273,11 triliun, terdiri dari pembelian SBN dari pasar perdana berdasarkan mekanisme Kesepakatan Bersama (KB)-I sebesar Rp49,11 triliun dan KB-III sebesar Rp224 triliun. Berlanjutnya pembelian SBN dari pasar perdana pada 2022 tersebut menunjukkan

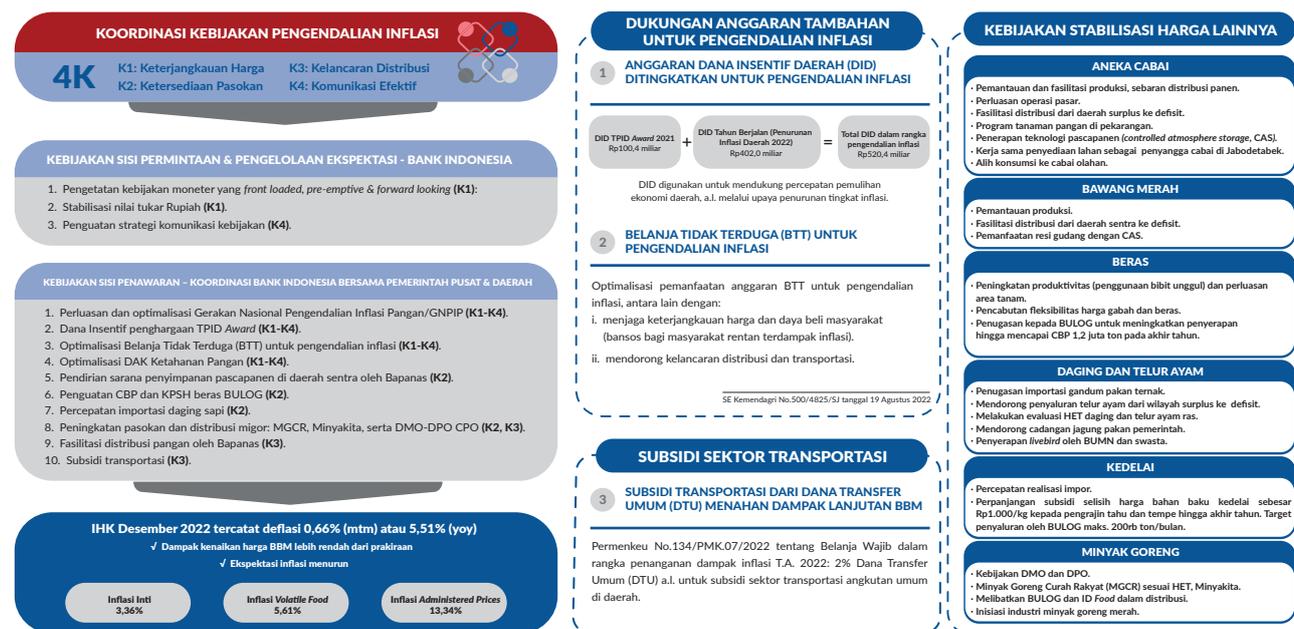
kuatnya komitmen Bank Indonesia dalam mendukung pendanaan APBN baik dalam pembiayaan kesehatan dan kemanusiaan sebagai dampak pandemi Covid-19 maupun akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Penguatan koordinasi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah juga terus ditempuh untuk mengendalikan dampak rambatan penyesuaian harga BBM.

Ketegangan geopolitik dan kebijakan proteksionisme pangan dan energi telah mendorong kenaikan harga pangan dan energi global yang menyebabkan peningkatan tekanan inflasi domestik. Harga minyak dunia melonjak hingga mencapai 112 dolar AS per barel telah menyebabkan Pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM subsidi pada September 2022 untuk menjaga kesinambungan fiskal serta mengalihkan subsidi ke kelompok sasaran yang lebih

tepat. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia memperlancar koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi di Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) untuk mengelola dampak rambatan penyesuaian harga BBM serta kenaikan harga pangan dunia melalui berbagai langkah nyata. Termasuk di dalamnya adalah koordinasi pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran antara lain melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), dukungan anggaran fiskal tambahan untuk menurunkan inflasi daerah melalui Dana Insentif Daerah (DID) dan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), subsidi transportasi antara lain dengan menggunakan Dana Transfer Umum (DTU), serta kebijakan stabilisasi lainnya untuk menahan kenaikan inflasi nasional (Gambar 3.1).

Gambar 3.1. Koordinasi Kebijakan untuk Pengendalian Inflasi 2022



Sumber: Bank Indonesia

3.1

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter untuk stabilisasi ditempuh dengan optimalisasi pengelolaan *trilemma* kebijakan moneter, baik melalui stabilisasi nilai tukar, normalisasi likuiditas dan kenaikan suku bunga kebijakan, maupun menjaga kecukupan devisa. Pada negara *small open economy*, dinamika perkembangan eksternal akan sangat memengaruhi kemampuan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian domestik, baik akibat volatilitas nilai tukar maupun aliran modal asing. Dalam kondisi ini, adanya permasalahan *trilemma* kebijakan (*impossible trinity*), secara teoritis mengharuskan bank sentral memilih 2 (dua) prioritas arah kebijakan di antara 3 (tiga) pilihan yakni otonomi kebijakan moneter untuk stabilitas harga domestik, stabilitas nilai tukar, dan mobilitas aliran modal asing. Namun demikian, alih-alih melakukan pilihan atas 3 (tiga) tujuan kebijakan tersebut, bank sentral dapat juga menempuh optimalisasi kebijakan moneter melalui respons suku bunga dan likuiditas, kebijakan nilai tukar, dan manajemen arus modal, yang juga didukung oleh kebijakan makroprudensial (Warjiyo, P., & Juhro, S. M., 2016, 2022). Dalam konteks terkini dimana ketegangan geopolitik tidak hanya telah memperburuk kinerja dan prospek ekonomi dunia namun juga memicu ketidakpastian pasar keuangan global, maka optimalitas pengelolaan *trilemma* kebijakan moneter menjadi sangat penting. Kebijakan suku bunga perlu tetap diarahkan untuk mengelola inflasi inti dan menjangkar ekspektasi inflasi dalam kisaran sasaran. Dalam kaitan ini, respons kebijakan suku bunga perlu diperkuat mengingat bahwa dalam kondisi eksekutif likuiditas yang tinggi maka efektivitas kebijakan suku bunga menjadi kurang optimal (Agenor et al, 2010; Saxegaard, 2006; Bathaluddin et al, 2012). Oleh karena itu, kebijakan suku bunga perlu didahului oleh kebijakan normalisasi likuiditas sebagaimana telah disinggung sebelum ini. Kebijakan nilai tukar ditujukan untuk mengelola stabilitas nilai tukar agar sejalan dengan nilai fundamentalnya guna mengendalikan inflasi barang impor (*imported goods*) sehingga mendukung pengendalian inflasi. Sementara itu, kecukupan cadangan devisa juga terus dijaga

untuk mendukung stabilisasi nilai tukar di tengah tekanan aliran keluar modal asing dalam bentuk portofolio yang cukup tinggi.

3.1.1. Kebijakan Stabilisasi Nilai Tukar

Bank Indonesia terus memperkuat langkah-langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah agar tetap sejalan dengan fundamentalnya di tengah tekanan eksternal yang meningkat. Penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah ditempuh sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama inflasi barang impor (*imported inflation*) di samping untuk memitigasi dampak rambatan dari kuatnya dolar AS dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Stabilisasi nilai tukar dilakukan melalui

Optimalisasi pengelolaan *trilemma* kebijakan moneter melalui normalisasi likuiditas dan respons suku bunga, kebijakan nilai tukar, dan menjaga kecukupan devisa

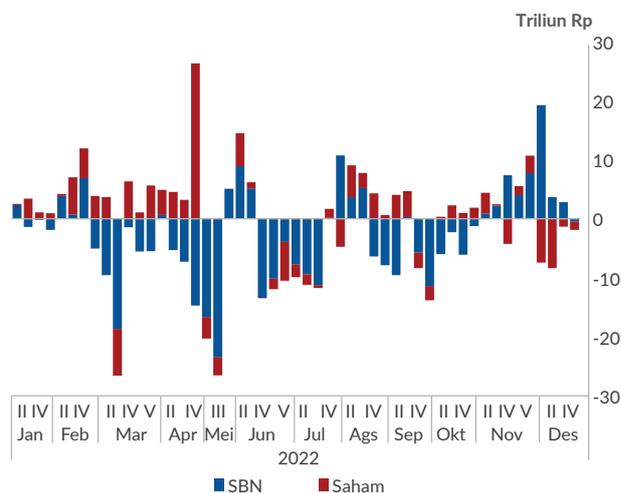
intervensi di pasar valas, baik melalui transaksi spot, DNDF, maupun pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder. Stabilisasi nilai tukar diperkuat melalui inovasi kebijakan *twist operation* untuk meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portofolio asing. Kebijakan *twist operation* dilakukan melalui pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder untuk meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN jangka pendek dan mendorong struktur *yield* SBN jangka panjang lebih landai. Hal ini mempertimbangkan tekanan inflasi lebih bersifat jangka pendek dan akan menurun kembali ke sasarannya dalam jangka menengah panjang. Untuk mendukung pelaksanaan *twist operation*, khususnya penjualan SBN di pasar sekunder, Bank Indonesia melakukan penguatan strategi operasi moneter melalui perluasan seri-seri SBN yang dapat dijual secara bertahap dan penyempurnaan formula *pricing* dalam pelaksanaan penjualan SBN di pasar sekunder.

Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia memperkuat pengendalian moneter di pasar valas dan pasar SBN serta memanfaatkan kerja sama dengan bank sentral lain. Bank Indonesia terus mengoptimalkan transaksi DNDF yang dilengkapi dengan fitur perpanjangan (*rollover*), berlaku antara Bank Indonesia dengan peserta Operasi Pasar Terbuka (OPT) maupun antarpelaku, sehingga dapat memastikan ketersediaan instrumen lindung nilai (*hedging*) secara berkelanjutan, termasuk penyediaan instrumen *swap* lindung nilai syariah untuk mendukung stabilitas nilai tukar. Selain itu, pada Desember 2022, Bank Indonesia menerbitkan instrumen operasi moneter (OM) valas yang baru untuk mendorong penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE), khususnya dari ekspor Sumber Daya Alam (SDA), di dalam negeri oleh bank dan eksportir untuk memperkuat stabilisasi, termasuk stabilitas nilai tukar Rupiah dan pemulihan ekonomi nasional. Instrumen OM Valas tersebut dilakukan dengan imbal hasil yang kompetitif berdasarkan mekanisme pasar yang transparan disertai dengan pemberian insentif kepada bank. Selain itu, sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas stabilisasi nilai tukar, Bank Indonesia juga memperkuat Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah (SISMONTAVAR) dengan mengadopsi inovasi teknologi terbaru sehingga dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif baik transaksi antarbank maupun transaksi antara bank dengan nasabah secara *real time* di pasar valas.

Depresiasi nilai tukar Rupiah pada 2022 masih relatif lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara berkembang lainnya sejalan dengan konsistensi kebijakan stabilisasi yang ditempuh dan persepsi positif investor asing yang tetap terjaga. Fragmentasi politik dan ekonomi serta langkah pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju mendorong sentimen *risk-off* investor, akibat prospek ekonomi dunia yang melambat dan masih

tingginya tekanan inflasi, yang makin meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global. Kondisi ini mendorong aliran modal keluar khususnya dari pasar surat berharga domestik sehingga nilai tukar Rupiah cenderung mengalami pelemahan sepanjang tahun 2022. Kendati demikian, depresiasi nilai tukar Rupiah lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti India dan Filipina. Nilai tukar yang relatif lebih baik tersebut tidak terlepas dari konsistensi Bank Indonesia dalam memonitor dan berada di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar, serta persepsi investor asing yang tetap positif terhadap prospek perekonomian Indonesia. Persepsi investor yang tetap positif ini ditunjukkan pada aliran portofolio asing yang masuk ke pasar saham sementara aliran modal keluar dari pasar SBN makin mereda terutama sejak Oktober 2022 (Grafik 3.1). Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati perkembangan pasokan valas dan memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan nilai fundamentalnya untuk mendukung upaya pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi.

Grafik 3.1. Aliran Modal Portofolio Pasar Obligasi dan Saham 2022



Sumber: Bank Indonesia

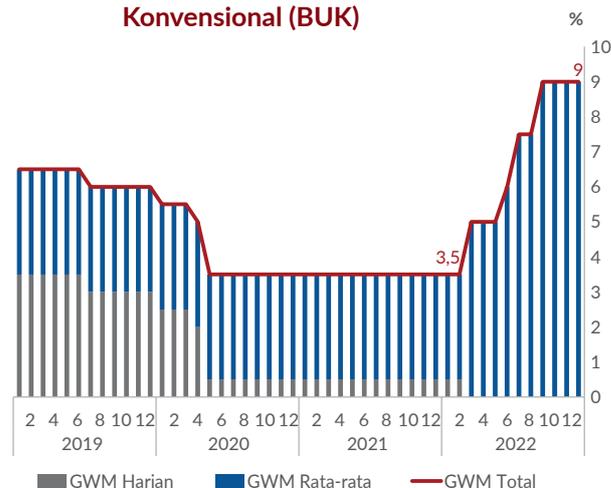
3.1.2. Kebijakan Normalisasi Likuiditas

Normalisasi kebijakan moneter Bank Indonesia dilakukan dengan penurunan secara bertahap kelebihan likuiditas yang sangat besar di perbankan.

Normalisasi kebijakan likuiditas ditempuh dengan menaikkan rasio GWM Rupiah secara bertahap, terukur dan sangat hati-hati, serta dikomunikasikan secara baik (*well-calibrated, well-planned, dan well-communicated*). Dengan perhitungan yang matang, rencana yang seksama, dan komunikasi yang jelas, kenaikan rasio GWM Rupiah tidak mengganggu kemampuan perbankan untuk menyalurkan kredit dan berpartisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN. Dengan demikian, kenaikan GWM tetap dapat mendukung terjaganya stabilitas moneter dan sistem keuangan serta berlangsungnya proses pemulihan ekonomi nasional. Normalisasi kebijakan likuiditas juga akan mendukung efektivitas transmisi kebijakan suku bunga BI7DRR dalam memengaruhi suku bunga tenor jangka yang lebih panjang.

Kebijakan kenaikan GWM Rupiah dikalibrasi untuk memitigasi dampak percepatan normalisasi kebijakan moneter global. Kebijakan tersebut ditempuh agar Bank Indonesia tidak *behind the curve* dalam merespons dampak meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global, akibat pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif di negara maju, terhadap stabilitas makroekonomi. Pada RDG Januari 2022, Bank Indonesia memutuskan kenaikan GWM secara bertahap untuk BUK dari 3,5% menjadi 5% mulai 1 Maret 2022, 6% mulai 1 Juni 2022, dan 6,5% mulai 1 September 2022. Sementara itu, GWM untuk BUK, BUS, dan UUS naik dari 3,5% menjadi 4,0% mulai 1 Maret 2022, 4,5% mulai 1 Juni 2022, dan 5% mulai 1 September 2022. Pada RDG Mei 2022, Bank Indonesia melakukan recalibrasi kebijakan GWM. Recalibrasi dilakukan sejalan dengan diperlukannya pengendalian inflasi dan stabilisasi nilai tukar di tengah percepatan normalisasi kebijakan moneter global. Dengan recalibrasi tersebut, kewajiban GWM Rupiah untuk BUK naik menjadi 6,0% mulai 1 Juni 2022, 7,5% mulai 1 Juli 2022, dan 9% mulai 1 September 2022 (Grafik 3.2). Sementara itu, kewajiban GWM Rupiah untuk BUS dan UUS naik menjadi 4,5% mulai 1 Juni 2022, 6,0% mulai 1 Juli 2022, dan 7,5% mulai 1 September 2022 (Grafik 3.3). Bank-bank yang

Grafik 3.2. Rasio GWM Rupiah Bank Umum Konvensional (BUK)

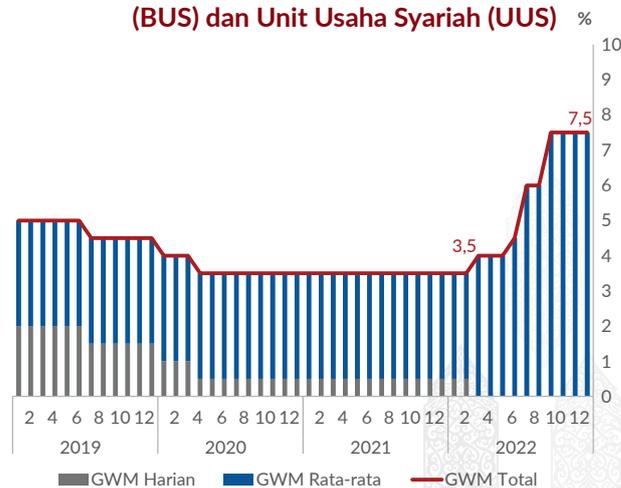


Sumber: Bank Indonesia

memenuhi ketentuan tersebut, diberikan remunerasi sebesar 1,5% terhadap pemenuhan kewajiban GWM, setelah memperhitungkan insentif bagi bank-bank dalam penyaluran kredit/ pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM dan/atau memenuhi target RPIM.

Kebijakan normalisasi likuiditas juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Dalam kondisi likuiditas yang tinggi, transmisi kebijakan moneter menjadi kurang efektif karena proses pembentukan harga oleh perbankan menjadi tidak sensitif terhadap suku bunga kebijakan sehingga dampak kenaikan suku bunga kebijakan terhadap inflasi menjadi lebih terbatas. Oleh karena itu, normalisasi likuiditas perlu ditempuh terlebih dahulu untuk mendukung efektivitas dampak kenaikan suku bunga terhadap inflasi. Hal tersebut juga sejalan dengan *best practices* dari *exit policy strategy* yang

Grafik 3.3. Rasio GWM Rupiah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)



Sumber: Bank Indonesia

mengindikasikan bahwa negara-negara yang memiliki eksekutif likuiditas besar cenderung lebih mendahulukan normalisasi likuiditas dibandingkan dengan kenaikan suku bunga. Hal ini pula yang mendasari Bank Indonesia melakukan normalisasi likuiditas, termasuk melalui kenaikan GWM Rupiah secara bertahap, sejak awal 2022 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Stance kebijakan normalisasi likuiditas juga didukung oleh penguatan strategi operasi moneter untuk menjaga ketersediaan likuiditas pasar uang. Dalam pelaksanaan operasi moneter, Bank Indonesia melanjutkan implementasi operasi moneter dua sisi (*two-sided monetary operation*), baik dari sisi kontraksi maupun ekspansi, secara reguler untuk menjaga ketersediaan likuiditas dan meningkatkan efisiensi pasar uang. Di tengah likuiditas yang longgar, pelaksanaan strategi operasi moneter dilakukan untuk mendukung kredibilitas kerangka operasi moneter dan suku bunga kebijakan yang sejalan dengan normalisasi kebijakan likuiditas. Hal ini ditempuh antara lain dengan mengelola likuiditas secara bertahap pada OM kontraksi tenor lebih panjang dan menata kembali suku bunga OPT kontraksi dan ekspansi sebagai *signaling* kebijakan tentunya dengan memperhatikan perkembangan kondisi likuiditas. Penguatan strategi operasi moneter juga dilakukan melalui optimalisasi frekuensi lelang OPT kontraksi tenor lebih panjang dan melakukan penjarangan frekuensi lelang OPT ekspansi tenor panjang secara bertahap dengan tetap menjaga ketersediaan likuiditas melalui OPT ekspansi tenor pendek secara harian. Di samping itu, juga dilakukan penguatan *pricing* OPT Rupiah dan pelaksanaan transaksi OPT *fine tune* untuk mengendalikan sasaran operasional yakni suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) tenor *overnight* secara bertahap bergerak mendekati BI7DRR guna mendukung efektivitas pencapaian transmisi kebijakan moneter.

Kebijakan kenaikan rasio GWM Rupiah yang disertai penguatan operasi moneter mampu mengurangi kelebihan likuiditas tanpa mengganggu kondisi likuiditas perbankan. Dampak dari kenaikan GWM Rupiah terhadap kondisi likuiditas perbankan tetap sesuai dengan yang diharapkan. Kebijakan ini mampu menyerap likuiditas Rupiah perbankan secara neto sekitar Rp269,3 triliun. Sejalan dengan hal tersebut,

rasio alat likuid perbankan (AL/DPK) turun dari 35,12% pada Desember 2021 menjadi 31,2% pada Desember 2022, masih lebih tinggi dari rerata rasio AL/DPK sebelum pandemi Covid-19 yang tercatat sekitar 20,7%. Kondisi likuiditas bank yang masih memadai tersebut tetap mendukung pembiayaan perbankan terhadap dunia usaha dan pembelian SBN.

3.1.3. Kebijakan Suku Bunga

Suku bunga BI7DRR tetap dipertahankan rendah sampai dengan Juli 2022 sejalan dengan inflasi inti yang masih terjaga. Sampai dengan sekitar pertengahan tahun 2022, inflasi inti masih terus terjaga pada level yang rendah di bawah 3,0% (yoy) di tengah kenaikan tekanan eksternal terkait dengan peningkatan risiko stagflasi di berbagai negara. Terjaganya inflasi inti tersebut ditopang oleh dampak inflasi dari sisi permintaan yang masih terbatas, ekspektasi inflasi yang terjangkau, stabilitas nilai tukar yang terjaga, serta dukungan kebijakan fiskal dalam menjaga harga BBM. Dengan tekanan inflasi inti yang masih rendah dan perbaikan ekonomi nasional yang masih berada pada tahap awal pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga kebijakan BI7DRR rendah sebesar 3,50%.

Sejak Agustus 2022, Bank Indonesia menaikkan BI7DRR sebagai langkah *front loaded, pre-emptive, dan forward looking* untuk memastikan terjaganya stabilitas inflasi ke depan. Dengan intensitas ketidakpastian global yang terus meningkat, kenaikan harga energi dan pangan global juga berlanjut sehingga mulai berdampak pada kenaikan inflasi inti dan perkiraannya ke depan. Bank Indonesia merespons peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi sebagai dampak rambatan dari kenaikan inflasi *volatile food* dan penyesuaian harga BBM dengan menaikkan BI7DRR sebesar 25 bps pada Agustus 2022. Bank Indonesia memperkuat kebijakan tersebut dengan kembali menaikkan BI7DRR pada September 2022, Oktober 2022, dan November 2022, masing-masing sebesar 50 bps serta pada Desember 2022 sebesar 25 bps menjadi 5,50%. Kenaikan suku bunga dilakukan untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang masih terlalu tinggi (*overshooting*) dan memastikan inflasi inti ke depan tetap berada dalam kisaran $3,0 \pm 1\%$. Selain itu, kenaikan BI7DRR juga ditempuh untuk mendukung kebijakan stabilisasi nilai tukar

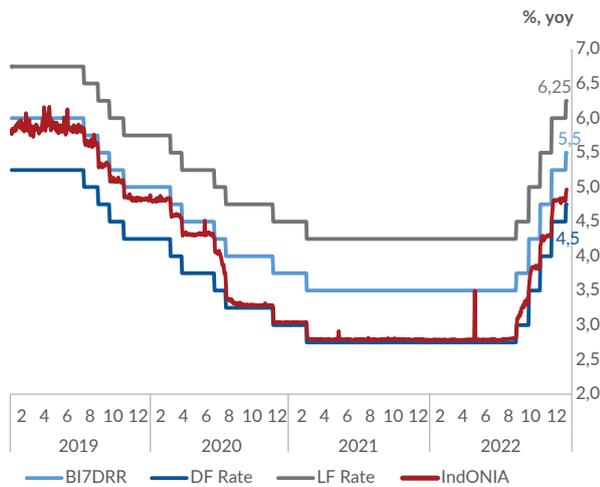
Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya di tengah kuatnya mata uang dolar AS dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Penguatan operasi moneter juga ditempuh untuk meningkatkan efektivitas transmisi kenaikan suku bunga dalam menjangkar ekspektasi inflasi.

Penguatan operasi moneter dilakukan melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI7DRR guna menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan

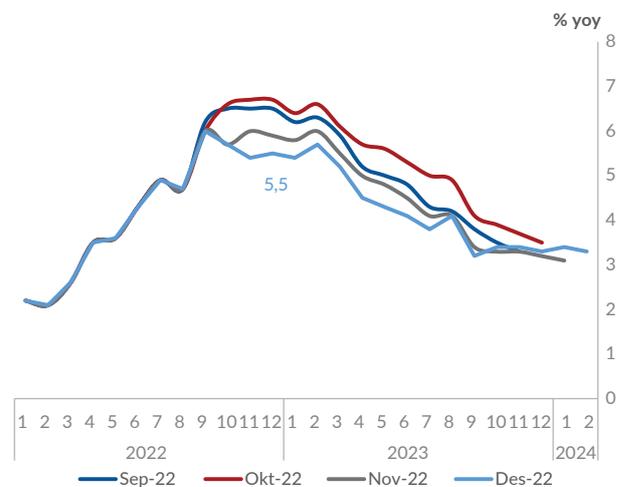
inflasi inti tetap terjaga pada kisaran 3,0±1% (Grafik 3.4). Dengan konsistensi langkah pengetatan kebijakan moneter yang diambil dan koordinasi kebijakan pengendalian inflasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) serta GNPIP, inflasi menjadi lebih rendah dari perkiraan awal. Ekspektasi inflasi juga mulai turun dari 6,5% pada bulan September 2022 menjadi 5,5% pada bulan Desember 2022 sehingga mendukung percepatan penurunan inflasi inti pada 2023 (Grafik 3.5).

Grafik 3.4. BI7DRR dan Suku Bunga PUAB



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.5. Ekspektasi Inflasi



Sumber: Consensus Economics

3.2

Kebijakan Makroprudensial

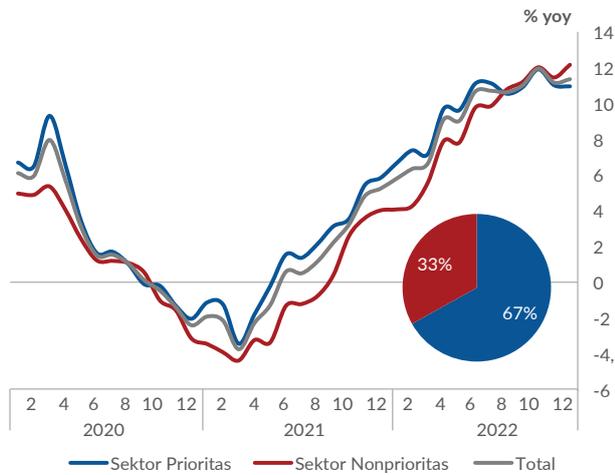
Kebijakan makroprudensial akomodatif terus diperkuat dan disinergikan dengan kebijakan KSSK untuk mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. *Pertama*, Bank Indonesia telah melakukan penyempurnaan kebijakan RPIM terutama melalui pemenuhan komitmen bank terhadap target RPIM yang sesuai dengan keahlian dan model bisnis bank masing-masing. Dengan penyempurnaan tersebut, diharapkan pembiayaan perbankan kepada UMKM dan perorangan berpenghasilan rendah (PBR) dapat meningkat. *Kedua*, pemberian insentif berupa pengurangan GWM bagi bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas dan inklusif. Kebijakan ini pertama kali diberlakukan pada 1 Maret 2022 yaitu insentif GWM paling besar 1% dengan rincian paling besar 0,5% bagi 38 sektor prioritas dan paling besar 0,5% untuk kredit inklusif. Pada 1 September 2022, insentif GWM ditingkatkan dan diperluas menjadi paling besar 2% dengan rincian 1,5% kepada 46 sektor prioritas, dan paling besar 0,5% untuk kredit inklusif. *Ketiga*, Bank Indonesia juga melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif sebelumnya, dengan mempertahankan rasio CCyB sebesar 0%, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%, serta rasio PLM sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, dan rasio PLM Syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%. Bank Indonesia juga melanjutkan pelonggaran rasio *Loan to Value/Financing to Value* (LTV/FTV) Kredit/

Pembiayaan Properti menjadi paling tinggi 100% dan pelonggaran ketentuan Uang Muka Kredit/ Pembiayaan Kendaraan Bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru. Kebijakan transparansi SBDK juga terus diperkuat guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan suku bunga dan makroprudensial.

Kebijakan makroprudensial longgar yang tersinergi dengan KSSK, dampak kenaikan suku bunga BI7DRR ke suku bunga perbankan yang masih relatif terbatas, dan kondisi likuiditas yang longgar mampu menopang perbaikan intermediasi perbankan.

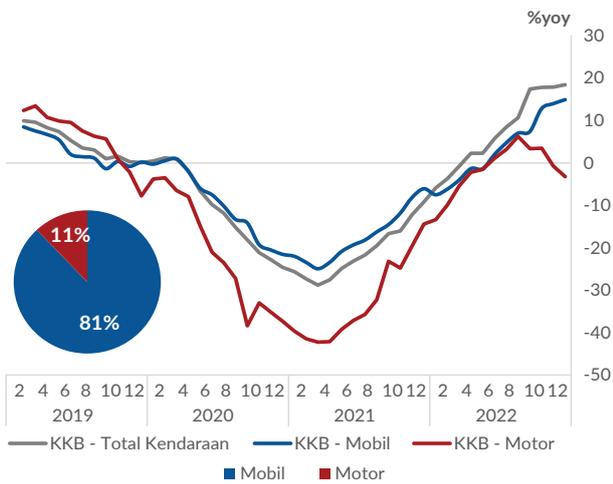
Pertumbuhan kredit terus meningkat hingga mencapai 11,35% pada Desember 2022 seiring dengan perbaikan baik di sisi permintaan maupun penawaran. Di sisi penawaran, pertumbuhan kredit tersebut juga ditopang oleh kebijakan pemberian insentif GWM kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas yang mampu memicu kredit sektor prioritas tumbuh tinggi (Grafik 3.6). Perbaikan pertumbuhan kredit juga ditopang oleh kredit perumahan dan kendaraan bermotor yang terus menunjukkan perbaikan sejalan dengan kebijakan LTV properti dan Uang Muka Kendaraan Bermotor yang tetap longgar (Grafik 3.7). Di samping itu, perbaikan pertumbuhan kredit pada tahun 2022 juga didukung oleh pelonggaran indeks *lending requirement* sejalan dengan penurunan SBDK dan suku bunga kredit yang ditopang oleh kebijakan Transparansi SBDK (Grafik 3.8 dan 3.9).

Grafik 3.6. Pertumbuhan Kredit Sektor Prioritas dan Nonprioritas



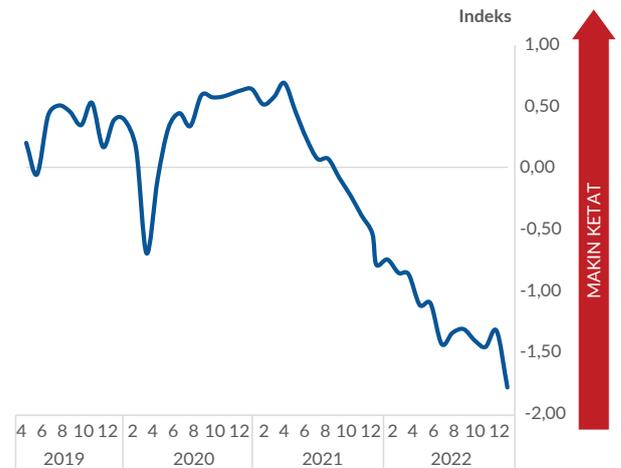
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.7. Pertumbuhan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)



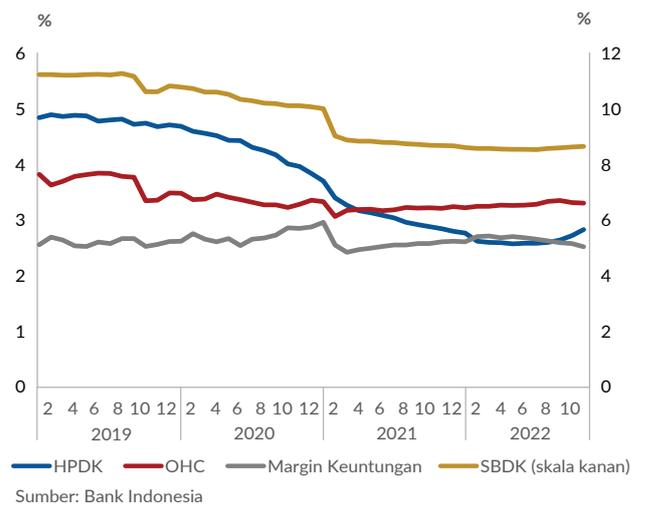
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.8. Indeks Lending Requirement



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.9. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Perbankan



Sumber: Bank Indonesia



3.3

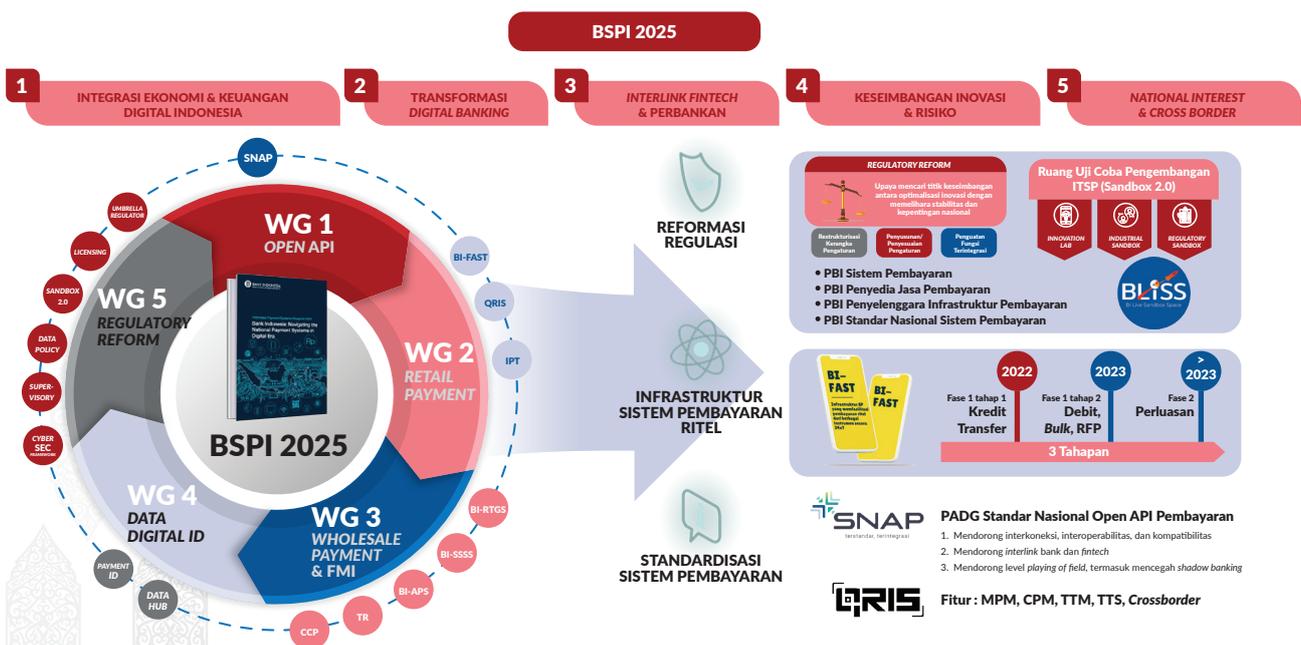
Kebijakan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia pada 2022 terus mengakselerasi dan memperluas digitalisasi sistem pembayaran guna mempercepat integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital sekaligus mendorong pemulihan ekonomi. Sesuai dengan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, fokus kebijakan pada 2022 diarahkan pada 3 (tiga) prioritas utama, yaitu reformasi regulasi, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran ritel, dan standarisasi sistem pembayaran (Gambar 3.2). Reformasi regulasi dilanjutkan sebagai wujud komitmen Bank Indonesia untuk menyederhanakan prosedur perizinan yang didukung penguatan pengaturan dan pengawasan guna mendorong inovasi sekaligus menjaga risiko di industri sistem pembayaran. Perizinan disederhanakan dengan pendekatan risiko dan pendekatan aktivitas, serta pemenuhan standar layanan untuk efisiensi dan kehati-hatian. Penyederhanaan prosedur perizinan ini menunjukkan hasil yang positif pascareformasi regulasi, di mana Bank Indonesia telah menerbitkan hingga hampir 5 (lima) kali lipat jumlah izin prinsip bagi penyelenggara dibandingkan periode sebelumnya, serta hampir 2 (dua) kali lipat jumlah persetujuan pengembangan

produk dan kerja sama selama Juli 2021-Desember 2022. Untuk mendukung penyederhanaan perizinan tersebut, fungsi pengawasan sebagai bagian dari reformasi regulasi sistem pembayaran di Indonesia juga terus diperkuat.

Pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang terintegrasi, terinteroperabilitas, dan terinterkoneksi dilanjutkan untuk mendukung ekosistem ekonomi-keuangan digital nasional. Bank Indonesia terus memodernisasi infrastruktur pembayaran ritel yang bersifat *national driven*, memiliki fitur serta merta (*real time*), dan beroperasi tanpa henti (24/7) melalui BI-FAST untuk memenuhi kebutuhan transaksi ritel yang terus berkembang pesat. Pada tahap awal, layanan BI-FAST difokuskan untuk transfer kredit individual sebelum ke depannya akan diperluas dengan membuka kanal layanan lainnya secara bertahap. Dengan dukungan berbagai kemudahan seperti kepesertaan yang terbuka, opsi penyediaan infrastruktur secara independen maupun bersama (*sharing*), penetapan batas maksimal transaksi Rp250 juta per transaksi, serta skema harga BI-FAST sebesar maksimal Rp2.500 per transaksi

Gambar 3.2. Perkembangan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025

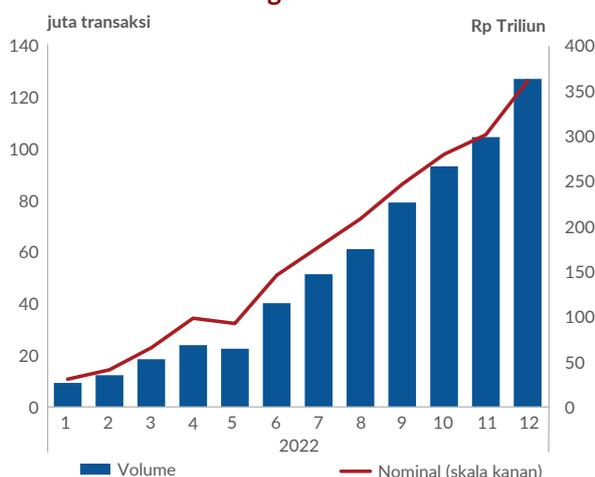


Sumber: Bank Indonesia

kepada nasabah dengan biaya Bank Indonesia ke peserta Rp19 per transaksi, BI-FAST makin diminati oleh masyarakat luas. Hal ini tercermin pada pesatnya perkembangan transaksi menggunakan BI-FAST, baik dari sisi volume maupun nilai nominal (Grafik 3.10). Selain itu, BI-FAST juga mendorong kenaikan transaksi transfer pada kanal *digital banking* hingga tiga kali lipat (Grafik 3.11). Kinerja positif BI-FAST tersebut menunjukkan bahwa BSPI 2025 mampu mendukung konsolidasi industri dan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional secara *end-to-end*, serta tercapainya sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal (CEMUMUAH).

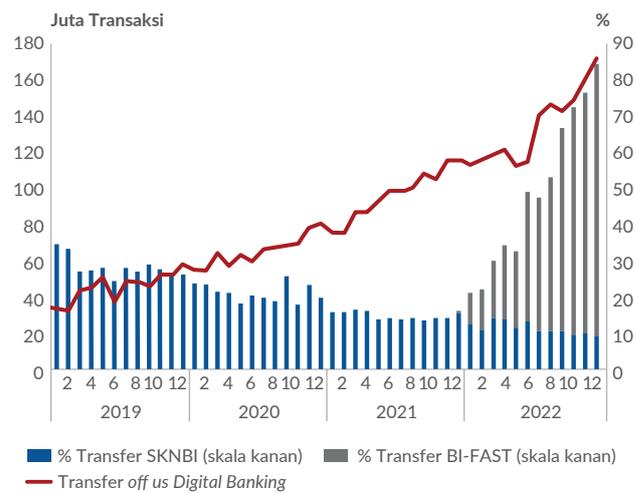
Bank Indonesia terus memperluas penggunaan QRIS sebagai standar nasional QR untuk mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran. Perluasan adopsi QRIS terus dilakukan baik dari sisi jumlah *merchant* maupun pengguna. Tahun ini, Bank Indonesia menargetkan 15 juta pengguna baru QRIS di seluruh penjuru nusantara. Untuk itu, sejumlah kemudahan dan insentif telah ditempuh, termasuk melalui perpanjangan *merchant discount rate* (MDR) QRIS 0% bagi usaha mikro hingga 30 Juni 2023 dan peningkatan limit transaksi QRIS dari semula Rp5 juta menjadi Rp10 juta per transaksi sejak 1 Maret 2022. Di samping itu, pengembangan fitur QRIS juga terus dilakukan, termasuk persiapan implementasi fitur QRIS Terima-Tarik-Setor (TTS), bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan industri. Dengan berbagai inovasi kebijakan yang ditempuh dan dukungan sinergi berbagai pihak terkait, target 15 juta pengguna baru QRIS mampu

Grafik 3.10. Perkembangan Transaksi BI-FAST



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.11. Perkembangan Transaksi Digital Banking

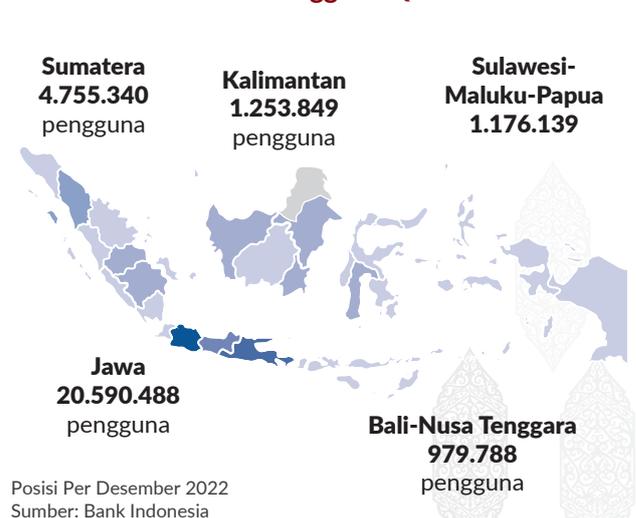


Sumber: Bank Indonesia

dicapai lebih awal yakni pada bulan Oktober 2022 dan terus meningkat menjadi 15,95 juta pengguna baru pada akhir 2022. Dengan perkembangan tersebut, QRIS saat ini mencakup 22,7 juta *merchant* dan lebih dari 28,8 juta pengguna dan telah menjadi *entry point* ke dalam ekosistem digital bagi UMKM untuk mendukung inklusi ekonomi dan keuangan (Gambar 3.3).

Pengembangan QRIS juga dilakukan untuk mendukung cross border payment dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya transaksi antarnegara. Dalam konteks ini, Bank Indonesia dan Bank of Thailand telah mengimplementasikan kerja sama pembayaran berbasis QR code lintas negara atau *cross-border QR payment linkage* sejak akhir Agustus 2022. Mekanisme penyelesaian transaksinya menggunakan metode *Local Currency Transactions*

Gambar 3.3. Sebaran Pengguna QRIS di Indonesia



Posisi Per Desember 2022
Sumber: Bank Indonesia

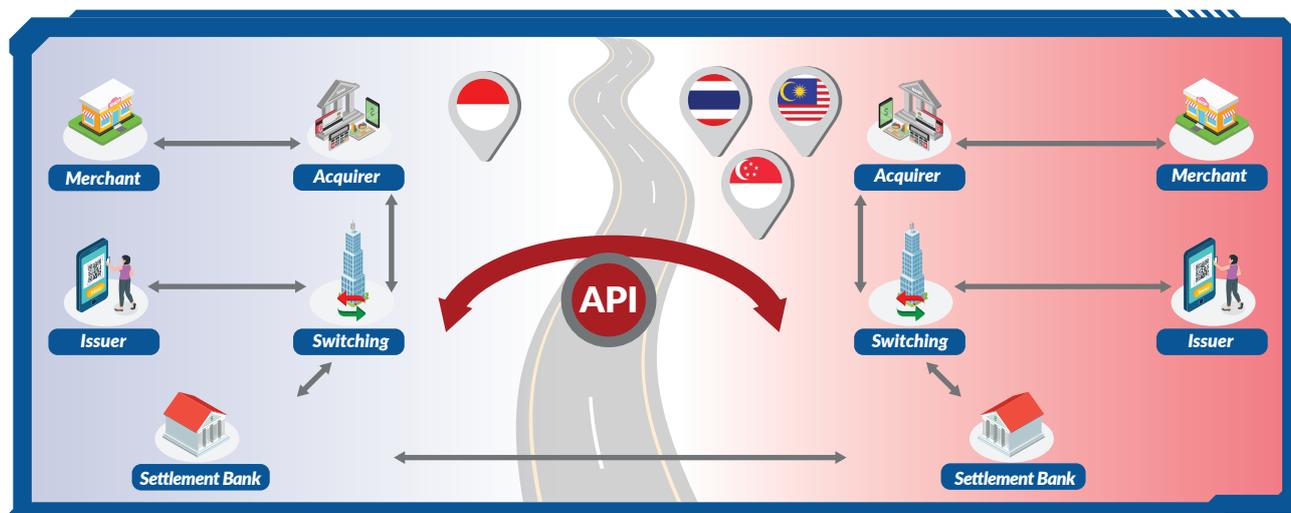
(LCT) melalui *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD) bank yang ada. Kerja sama penggunaan QR code lintas negara juga tengah diperluas, termasuk *piloting* bersama Bank Negara Malaysia sejak akhir Januari 2022 dan persiapan implementasi dengan Monetary Authority of Singapore (MAS) yang direncanakan dimulai pada triwulan IV 2023 (Gambar 3.4). Berbagai inisiatif kerja sama tersebut diyakini akan mampu mendorong digitalisasi pembayaran dan pembayaran lintas negara, sebagaimana yang telah direncanakan dalam BSPI 2025 serta sejalan dengan salah satu agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 dan Pertemuan Gubernur Bank Sentral ASEAN pada April 2022.

Penerapan Standar Nasional Open API (SNAP) juga diperkuat dengan melibatkan peran *market leader* untuk mempercepat berkembangnya ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Sejak diinisiasi pada 17 Agustus 2021, SNAP, sebagai buah dari kerja sama Bank Indonesia dengan ASPI, terus diakselerasi implementasinya sebagai standar nasional protokol dan instruksi yang memfasilitasi interkoneksi antar aplikasi secara terbuka dalam pemrosesan transaksi pembayaran. Strategi akselerasi ditempuh dengan menunjuk beberapa *market leaders* sebagai *first movers* yang diharapkan dapat memperluas adopsi SNAP. Operasionalisasi standar SNAP pada *first movers* ini telah mewakili lebih dari 50 persen pangsa untuk setiap segmen ekonomi dan keuangan digital, seperti *e-commerce*, uang elektronik, dan

digital banking. Dalam konteks ini, sejak Juni 2022 SNAP telah melibatkan 15 penyelenggara (terdiri dari 5 Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) bank, 4 PJP penyelenggara uang elektronik, 3 PJP *payment gateway*, dan 3 penyelenggara *e-commerce*) sebagai *first movers* yang merupakan *market leader* (Gambar 3.5). Pada tahap selanjutnya, Implementasi SNAP *second movers* telah selesai dilaksanakan dengan 67 PJP tambahan dan mulai beroperasi pada awal 2023. Perluasan implementasi SNAP ini diharapkan akan memperkuat *interlink* antara PJP bank dengan nonbank dan menjaga *level of playing field* antarpelaku sehingga mengurangi fragmentasi dan mendukung akselerasi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia.

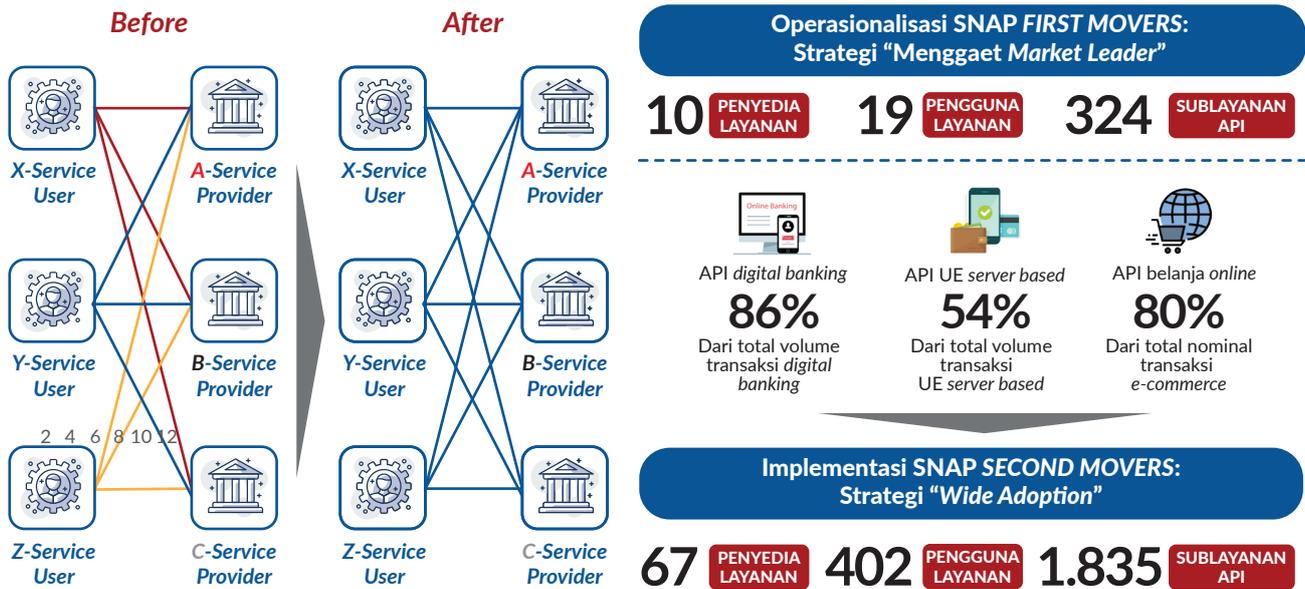
Dukungan kebijakan sistem pembayaran terhadap pemulihan ekonomi melalui kebijakan *pricing* terus dilanjutkan. *Pertama*, Bank Indonesia memperpanjang masa berlaku kebijakan batas minimal pembayaran sebesar 5% dari total tagihan dan nilai denda keterlambatan pembayaran Kartu Kredit sebesar 1% atau maksimal Rp100.000 dari semula berakhir 30 Juni 2022 menjadi 31 Desember 2022. Perpanjangan kebijakan ini diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dengan memberikan keringanan kepada pemegang kartu kredit dalam membayar tagihan, menjaga portofolio rasio kredit bermasalah kartu kredit, dan mengurangi risiko *moral hazard* pemegang kartu kredit sehingga tetap melaksanakan kewajibannya. *Kedua*, Bank Indonesia

Gambar 3.4. Skema Transaksi QRIS Lintas Negara



Issuer (Account Issuance Services): Pihak yang menatausahakan sumber dana
Acquirer (payment initiation/acquirer services): Pihak yang meneruskan transaksi pembayaran
Lembaga Switching (PIP): Pihak yang melakukan kliring dan setelmen transaksi pembayaran
Bank Settlement: Bank yang ditunjuk oleh otoritas untuk memfasilitasi pelaksanaan LCT melalui pembukaan rekening mata uang negara mitra di negara masing-masing
Sumber: Bank Indonesia

Gambar 3.5. Peserta SNAP First Movers sebagai Market Leader

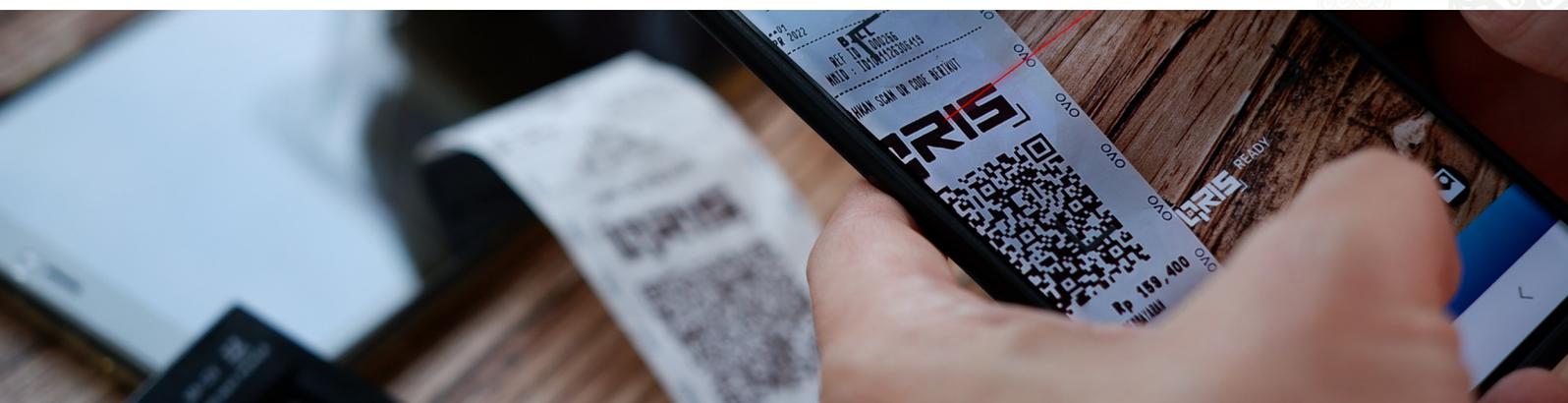


Sumber: Bank Indonesia

juga memperpanjang masa berlaku kebijakan tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah dari semula berakhir 30 Juni 2022 menjadi 31 Desember 2022. Perpanjangan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan aktivitas ekonomi masyarakat serta memudahkan transaksi keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi. Dengan mempertimbangkan masih diperlukannya dukungan lebih lanjut kebijakan sistem pembayaran terhadap proses pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia pada Desember 2022 memutuskan untuk kembali memperpanjang masa berlaku kebijakan batas minimal pembayaran, nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit, dan tarif SKNBI di atas menjadi 30 Juni 2023.

Berbagai kebijakan sistem pembayaran untuk mendorong inovasi serta integrasi ekonomi dan keuangan digital dimaksud juga diperkuat oleh sinergi kebijakan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, perbankan, dan asosiasi pelaku industri. Sesuai dengan tahapan implementasi BSPI 2025, Bank Indonesia bersinergi dengan Pemerintah dan

Bank HIMBARA telah menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik yang menggunakan mekanisme QRIS berbasis sumber dana kredit sehingga seluruh transaksi diproses di dalam negeri. Dengan menggunakan KKP Domestik, yang telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 29 Agustus 2022 ini, Pemerintah Pusat dan Daerah dapat melakukan transaksi di lebih dari 28,8 juta merchant QRIS di Indonesia sehingga mendukung pemulihan ekonomi jangka pendek, meningkatkan keuangan inklusi, termasuk UMKM, menopang kesehatan fiskal, dan mendorong efisiensi ekonomi. Hal ini juga merupakan bentuk afirmasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang mendorong pembelian barang buatan Indonesia. Sinergi akselerasi pembayaran digital nasional juga ditempuh untuk meningkatkan akseptasi pembayaran digital melalui program Sehat, Inovatif, Aman, Pakai QRIS (S.I.A.P QRIS) di berbagai pasar tradisional dan pusat perbelanjaan/mal di Indonesia. Sinergi percepatan elektronifikasi sistem pembayaran juga ditempuh dengan terus mendorong integrasi sistem dan pembayaran antarmoda, termasuk mendukung persiapan penerapan teknologi



nirsentuh di jalan tol yang akan mulai beroperasi bertahap pada akhir 2022. Lebih lanjut, Bank Indonesia terus memperkuat elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah melalui sinergi program strategis Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), termasuk mempersiapkan *flagship* program *championship* Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Sinergi antarkementerian/lembaga dan otoritas juga terus dilakukan dengan menyukseskan penyelenggaraan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) sebagai wadah sinergi kebijakan dan berbagai program guna mengakselerasi ekonomi keuangan digital dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kegiatan FEKDI pada 2022 juga menjadi *side event* dalam rangkaian *G20 Finance Track: Finance and Central Bank Deputies (FCBD)* dan *3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG)* di Nusa Dua, Bali.

Di bidang pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia terus melanjutkan transformasi pengelolaan uang rupiah (PUR) sesuai tahapan implementasi **Blueprint Pengelolaan Uang Rupiah (BPPUR) 2025**. Transformasi diarahkan untuk menyediakan uang layak edar dengan denominasi yang sesuai, *just in time* melalui *central bank driven*, selaras dengan arah kebijakan nontunai, serta memperhatikan efisiensi dan kepentingan nasional. Implementasi transformasi dilakukan dengan mengedepankan

digitalisasi pada seluruh tahapan PUR mulai dari perencanaan, penyimpanan dan pengolahan, hingga pengedaran (Gambar 3.6). Pada tahap perencanaan, Bank Indonesia menerapkan digitalisasi penyusunan proyeksi kebutuhan uang menggunakan platform Aplikasi Kebutuhan Uang Rupiah dan Analitik Terintegrasi (Akurat) untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis perencanaan uang. Pada tahap penyimpanan dan pengolahan, digitalisasi diimplementasikan melalui prinsip *less human intervention* dengan penggunaan mesin dan peralatan secara robotik, serta penerapan *warehouse management system* menggunakan *racking system* untuk mendukung digitalisasi penyimpanan uang. Pada tahap pengedaran, Bank Indonesia melakukan digitalisasi layanan kas kepada masyarakat dilakukan melalui penyediaan Aplikasi Pemesanan dan Tarik Uang Rupiah (PINTAR) sehingga masyarakat dapat melakukan pemesanan layanan kas Bank Indonesia secara daring, makin mudah, aman, dan nyaman. Sinergi kebijakan juga ditempuh Bank Indonesia bersama TNI AL dengan melanjutkan kegiatan Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2022 untuk mendukung pengedaran uang hingga menjangkau wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T). Bank Indonesia juga menerbitkan uang baru Tahun Emisi (TE) 2022 bertepatan dengan dengan perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, tanggal 17 Agustus 2022, penjelasan lebih detail terdapat pada Boks Uang Rupiah Tahun Emisi 2022.

Gambar 3.6. Digitalisasi Pengelolaan Uang Rupiah



Sumber: Bank Indonesia

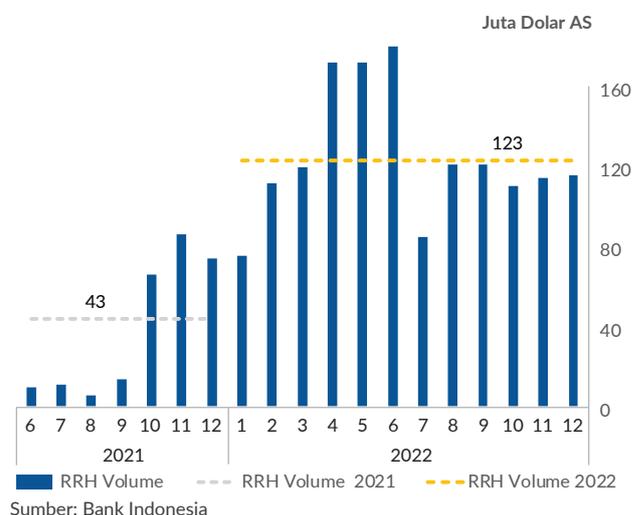
3.4

Kebijakan Pengembangan Pasar Uang

Akselerasi pendalaman pasar keuangan terus dilanjutkan untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter serta pembiayaan infrastruktur dan dunia usaha guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Berbagai program pendalaman dan pengembangan pasar keuangan dilakukan sebagai bagian dari implementasi *Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025 (BPPU 2025)* yang memiliki 3 (tiga) pilar inisiatif utama, meliputi: (i) digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan; (ii) penguatan efektivitas transmisi kebijakan moneter; dan (iii) pengembangan instrumen keuangan sebagai sumber pembiayaan ekonomi dan penguatan manajemen risiko.

Digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan terus dilakukan dengan memperkuat infrastruktur pasar uang yang terinterkoneksi, terintegrasi, dan memiliki interoperabilitas, aman, serta andal. Untuk mendukung pembentukan harga makin efisien dan transparan, kebijakan pengembangan infrastruktur pasar keuangan pada 2022 difokuskan pada pengembangan *Electronic Trading Platform (ETP)* dan *Central Counterparty (CCP)*, termasuk pemberian izin usaha kepada penyedia ETP *existing* yang ada di pasar uang dan pasar valas serta memiliki kelembagaan domestik. Dengan beroperasinya penyedia ETP bilateral dan multilateral secara resmi di pasar uang dan pasar valuta asing, partisipasi pelaku pasar untuk melakukan transaksi melalui ETP meningkat hampir 2 (dua) kali lipat, yakni dari 21 bank pada Juni 2021 menjadi 41 bank pada Desember 2022 yang diikuti peningkatan rata-rata harian volume transaksi spot USD/IDR melalui ETP dari 37,9 juta dolar AS pada 2021 menjadi 123,0 juta dolar AS pada 2022 (Grafik 3.12). Koordinasi dengan otoritas terkait dan asosiasi pelaku industri juga terus ditempuh guna mengakselerasi pendirian lembaga CCP di pasar uang dan pasar valuta asing yang *integrated, interconnected, and interoperable (3I)*, baik dari aspek kesiapan teknologi maupun nonteknis, sebagai *systemically important financial market infrastructure*. Pengembangan ini juga didukung oleh kriteria anggota CCP yang sejalan dengan peta jalan kepesertaan infrastruktur sistem pembayaran dan

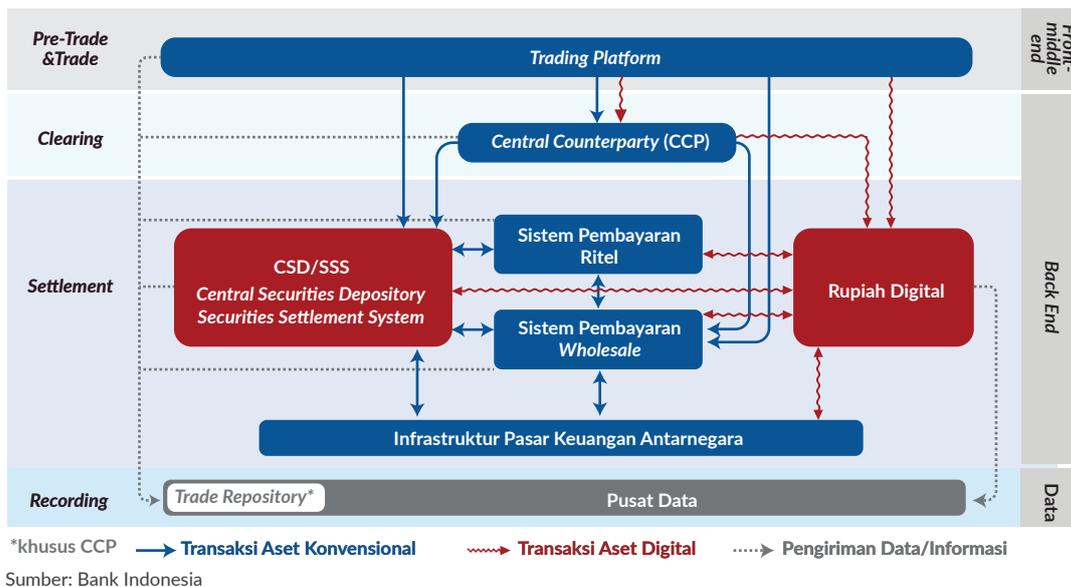
Grafik 3.12. Rerata Harian Transaksi Spot Melalui ETP



infrastruktur pasar keuangan Bank Indonesia. Di samping itu, Bank Indonesia juga terus melakukan pengembangan *BI-Auction Platform System (BI-APS)*, *BI-Scriptless Securities Settlement System (BI-SSSS)* dan *BI-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)* agar selaras dengan *BSPI 2025* dan perkembangan teknologi digital ke depan (Gambar 3.7).

Upaya penguatan efektivitas transmisi kebijakan moneter tahun 2022 difokuskan pada pengembangan transaksi repo dan penguatan suku bunga referensi Rupiah. Pengembangan transaksi *repurchase agreement (repo)* dilakukan berkoordinasi erat dengan otoritas terkait dan asosiasi industri dalam rangka standardisasi transaksi repo antar pelaku pasar dengan transaksi repo dalam Operasi Pasar Terbuka Bank Indonesia, penyediaan informasi harga repo antar pelaku yang likuid dan transparan, dan perluasan basis pelaku nonbank. Sementara itu, penguatan suku bunga referensi Rupiah (*domestic benchmark reform*) dilakukan dengan menjadikan Indonesia *Overnight Index Average (IndONIA)* sebagai suku bunga referensi Rupiah untuk tenor *overnight* pada 31 Maret 2022 yang diikuti dengan penerbitan panduan peggunaan *IndONIA* sebagai referensi suku bunga rupiah tenor *non-overnight* untuk berbagai produk keuangan pada 30 September 2022. Sinergi dengan *National Working Group on Benchmark Reform (NWGBR)* juga ditempuh untuk mempercepat

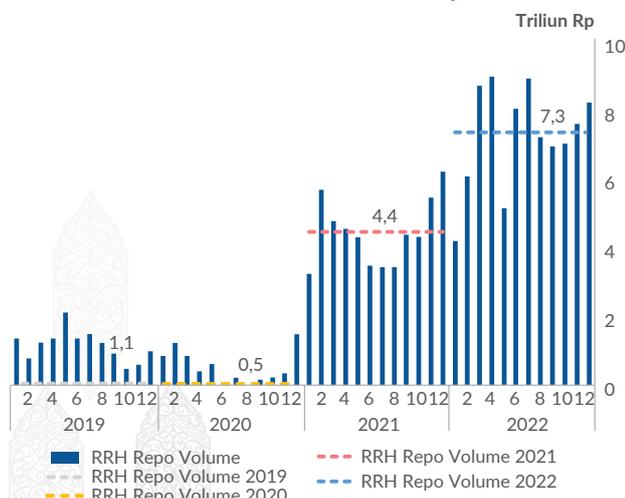
Gambar 3.7. Keterkaitan Infrastruktur Pasar Keuangan



penyesuaian *domestic benchmark reform* dengan meningkatkan produk pasar keuangan berbasis IndONIA. Sebagai komitmen Bank Indonesia dalam mendukung *domestic benchmark reform*, Bank Indonesia menerbitkan penyempurnaan ketentuan IndONIA dengan cakupan penyempurnaan diantaranya terkait rencana publikasi *Compounded IndONIA* dan *IndONIA Index* guna mendorong pemanfaatan IndONIA sebagai suku bunga referensi berbagai produk pasar Keuangan (*IndONIA-based market*). Perluasan produk pasar berbasis IndONIA sehingga dapat memperkuat integritas suku bunga referensi Rupiah guna mendukung pendalaman pasar keuangan, efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan. Sinergi kebijakan

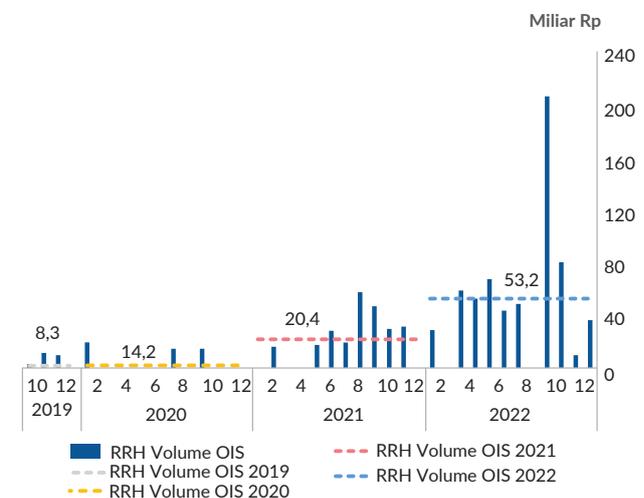
pengembangan transaksi repo dan penguatan suku bunga referensi Rupiah tersebut menunjukkan hasil yang positif sebagaimana tercermin pada meningkatnya volume transaksi derivatif pada 2022. Rata-rata harian (RRH) volume transaksi repo terus meningkat, dari Rp4,4 triliun pada 2021 menjadi Rp7,3 triliun pada 2022 - (Grafik 3.13), sementara rerata rasio transaksi repo terhadap total transaksi pasar uang juga naik dari 39% menjadi 43%. Di samping itu, RRH transaksi derivatif suku bunga *overnight index swap* (OIS) yang menggunakan referensi IndONIA juga meningkat dari Rp20,4 miliar pada 2021 menjadi Rp53,2 miliar pada tahun 2022 - (Grafik 3.14).

Grafik 3.13. Rerata Harian Volume Repo



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.14. Rerata Harian Volume OIS



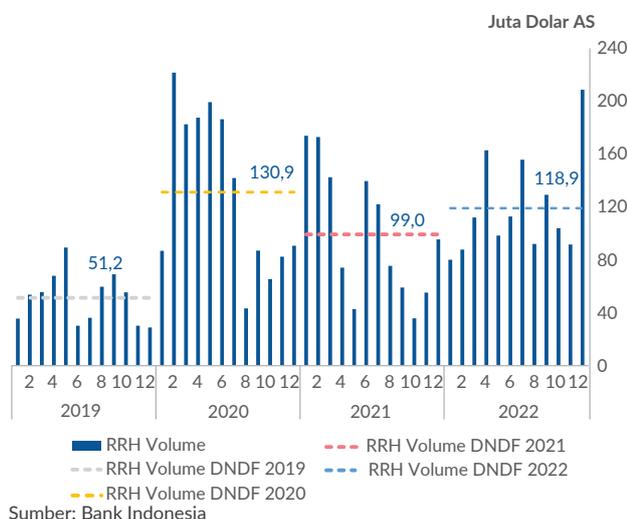
Sumber: Bank Indonesia

Inisiatif pengembangan instrumen keuangan tahun 2022 ditempuh melalui pengembangan transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF)* serta perluasan dan penguatan kerangka *Local Currency Settlement (LCS)* untuk mengembangkan pasar valuta asing. Inisiatif pengembangan transaksi DNDF dilakukan dengan meningkatkan fleksibilitas transaksi untuk mendorong *supply-demand* dan pembentukan harga yang efisien melalui implementasi kurs acuan non-USD/IDR. Inisiatif pengembangan DNDF dilakukan melalui penyempurnaan ketentuan transaksi di pasar valuta asing, termasuk integrasi dan simplifikasi ketentuan; pengaturan dengan pendekatan *principle-based* untuk meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas implementasi; serta dukungan terhadap pembentukan permintaan dan penawaran valuta asing yang optimal. Sejalan dengan berbagai inisiatif tersebut, serta berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional dan meningkatnya kebutuhan *hedging* atas kepemilikan surat berharga, RRH volume transaksi DNDF meningkat dari 99,1 juta dolar AS pada 2021 menjadi 118,9 juta dolar AS pada 2022 - (Grafik 3.15). Sementara itu, perluasan penggunaan LCS terus didorong termasuk melalui pembentukan *Task Force* Nasional LCS pada Mei 2022, sebagai wujud sinergi dan komitmen nasional dalam mendorong akselerasi pemanfaatan LCS. Selain itu, Bank Indonesia juga memperluas cakupan kerja sama LCS dengan Thailand dengan memasukkan DNDF dalam kerja sama dimaksud. Kerangka LCS juga diperkuat dan dikembangkan menjadi *Local Currency Transactions (LCT)* yang mencakup tidak hanya transaksi pada *current*

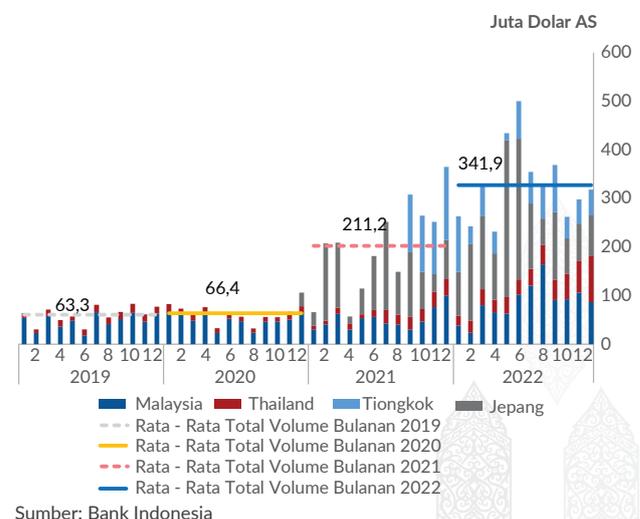
account, namun juga *capital account* dan *financial account*, termasuk sebagai mekanisme setelmen transaksi dalam rangka implementasi kerja sama QR Code lintas negara (QRIS Cross Border) dengan Thailand dan *piloting* dengan Malaysia. Berbagai langkah tersebut mampu mendukung naiknya volume transaksi LCS dari rata-rata per bulan sebesar 211,2 juta dolar AS pada 2021 menjadi 341,9 juta dolar AS pada 2022- (Grafik 3.16).

Kompetensi pelaku pasar juga terus diperkuat untuk mendukung kebijakan pengembangan produk keuangan. Sejalan dengan perubahan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) terbaru dan penerapan kode etik yang mengacu pada *international best practices*, Bank Indonesia pada tahun 2022 menerbitkan penyempurnaan ketentuan mengenai kode etik dan sertifikasi tresuri. Penyempurnaan ketentuan mengenai kode etik dan sertifikasi tresuri juga merupakan bagian dari implementasi *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang 2025 khususnya terkait upaya Bank Indonesia dalam melakukan penguatan integritas dan kredibilitas pasar serta penerapan prinsip kehati-hatian, agar sejalan dengan reformasi regulasi di pasar uang. Penguatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan integritas dan kompetensi pelaku pasar keuangan domestik agar dapat bersaing dengan pelaku pasar keuangan internasional. Adapun aspek yang diatur meliputi: (i) pemahaman dan penerapan kode etik pasar, (ii) pelaksanaan sertifikasi tresuri, (iii) sertifikasi tresuri, (iv) pelaksanaan pemeliharaan kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP), otoritas, dan/

Grafik 3.15. Rerata Harian Transaksi DNDF



Grafik 3.16. Volume Bulanan LCS





atau pihak lainnya, (v) penyampaian laporan oleh pelaku transaksi di pasar uang dan LSP, dan (vi) tata cara pengeunaan sanksi.

Pengembangan instrumen keuangan sebagai sumber pembiayaan ekonomi dan penguatan manajemen risiko dimaksud terus ditempuh Bank Indonesia dengan bersinergi dengan otoritas dan pelaku pasar di sektor keuangan. Sinergi dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) dipererat antara lain melalui pengembangan sekuritisasi aset dengan *underlying* kredit/pembiayaan UMKM, pengembangan dan *piloting* instrumen pembiayaan maupun transaksi

derivatif berwawasan berkelanjutan (*environmental, social, and governance* atau ESG), dan program peningkatan basis investor ritel melalui kampanye kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) yang tahun ini fokus pada literasi instrumen keuangan hijau dan instrumen keuangan syariah. Sinergi pengembangan pasar uang dan pasar valas juga dilakukan dalam bentuk harmonisasi pengaturan perpajakan pasar uang agar mendukung pengembangan instrumen pasar uang sebagai sumber pembiayaan pembangunan ekonomi nasional.

3.5

Kebijakan Ekonomi-Kuangan Inklusif dan Hijau

Bank Indonesia terus mendorong akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif, bersinergi dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain. Penguatan dan perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah terus ditempuh melalui 3 (tiga) pilar strategi, yakni pemberdayaan ekonomi syariah melalui pengembangan *halal value chain*, pengembangan keuangan syariah melalui pendalaman pasar keuangan syariah, serta penguatan riset, asemen dan edukasi, termasuk melalui sosialisasi. Pada pilar pertama, pemberdayaan ekonomi syariah dilakukan dengan pendekatan pengembangan ekosistem *halal value chain*. Pada pendekatan ini pengembangan ditempuh melalui penguatan kapasitas pelaku, termasuk unit usaha di pesantren, penguatan model bisnis syariah, penguatan aspek kelembagaan, dan penguatan infrastruktur pendukung, termasuk dukungan akselerasi proses sertifikasi halal. Pada tahun 2022, kebijakan tersebut difokuskan terutama pada sektor unggulan ekonomi syariah, khususnya sektor makanan halal dan fesyen muslim. Pada

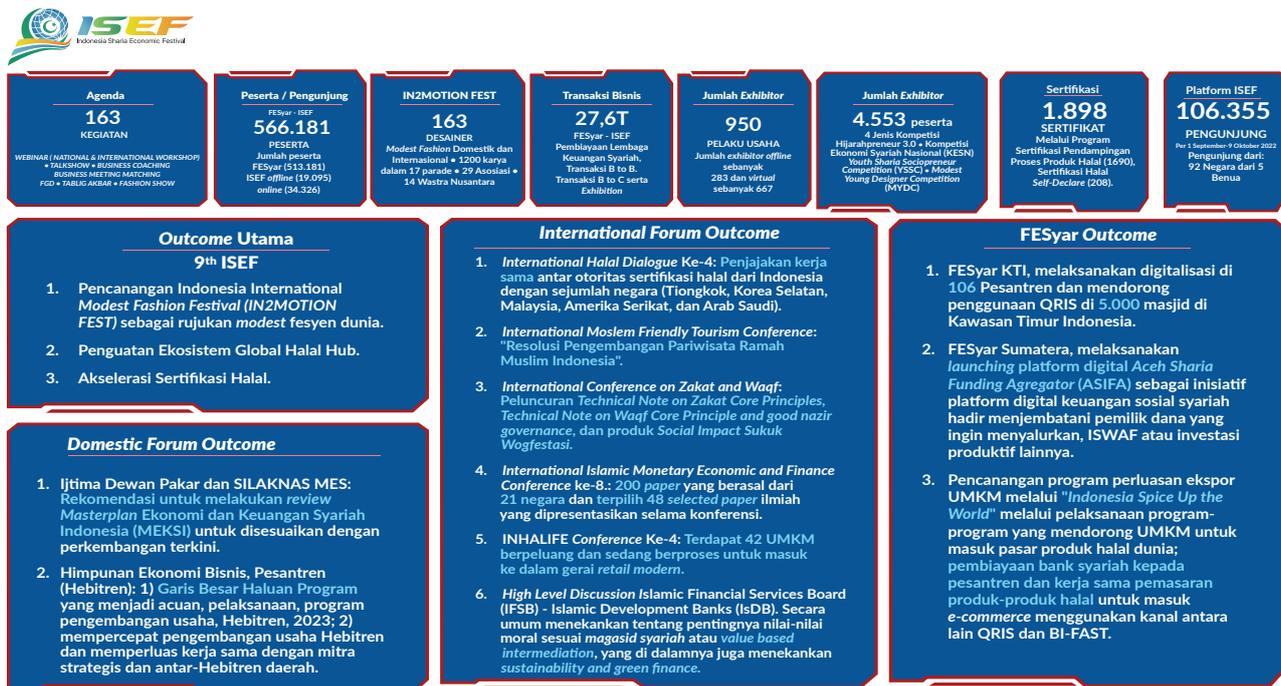
sektor makanan halal, penguatan ditempuh melalui pengembangan model bisnis komoditas pangan berbasis komunitas dan pesantren untuk peningkatan produksi pangan, khususnya komoditas penyumbang inflasi dan komoditas substitusi bahan baku impor. Program pengembangan usaha pondok pesantren Bank Indonesia secara nasional hingga tahun 2022 telah diimplementasikan di 665 pondok pesantren yang tersebar di 34 provinsi. Di samping itu, Bank Indonesia juga terus melakukan pendampingan untuk akselerasi proses sertifikasi produk halal. Pada sektor fesyen muslim, upaya pengembangan antara lain dilakukan melalui penyelenggaraan *Indonesia International Modest Fashion Festival (In2MotionFest)* di *Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)* ke-9 tahun 2022, bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Penyelenggaraan kegiatan berskala internasional ini merupakan perwujudan upaya pengembangan sektor fesyen muslim Indonesia secara *end-to-end*, mulai dari peningkatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan kualitas produk, sampai dengan perluasan akses pasar.



Pada pilar keuangan syariah, pengembangan instrumen pasar uang syariah, penguatan regulasi, dan perluasan transaksi terus ditempuh untuk mendukung peningkatan pembiayaan syariah. Pengembangan instrumen antara lain ditempuh dengan menerbitkan Sukuk BI (SukBI) Inklusif untuk mendukung pengembangan instrumen moneter dan pasar uang syariah. SukBI Inklusif ini adalah Sukuk BI yang diterbitkan Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying* SBSN inklusif, yakni SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah untuk membiayai kegiatan inklusif tertentu seperti program kesehatan, kemanusiaan, dan ekonomi hijau. SukBI Inklusif juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh perbankan syariah dalam memenuhi ketentuan kebijakan makroprudensial, termasuk RPIM dan PLM. Bank Indonesia juga telah mengembangkan instrumen *swap* lindung nilai syariah bank kepada Bank Indonesia guna mendukung manajemen pengelolaan nilai tukar perbankan syariah untuk mendukung pengelolaan moneter yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang. *Swap* lindung nilai ini dilakukan dengan skema transaksi lindung nilai kompleks (*akad al-tahawwuth al-murakkab*) sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.96/DSN-MUI/IV/2015. Tersedianya *swap* lindung nilai tersebut diharapkan dapat memperkuat manajemen risiko bank syariah serta memberikan keyakinan untuk melakukan transaksi valas guna mendukung pembiayaan ekonomi. Standardisasi perjanjian kerja sama untuk transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA), serta dukungan peningkatan transaksi *outright* surat berharga syariah di pasar sekunder maupun *underlying* untuk SiPA dan repo syariah juga telah dilakukan untuk mendukung perluasan transaksi pembiayaan syariah. Dukungan infrastruktur dan regulasi keuangan syariah terus diperkuat melalui penerbitan ketentuan di pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Di samping itu, penguatan sektor keuangan sosial juga terus dikedepankan termasuk melalui pengembangan model integrasi keuangan komersial dan sosial berupa model wakaf produktif, bekerja sama dengan *Awqaf Properties Investment Fund*, Islamic Development Bank (APIF-IsDB), serta pengumpulan dan penyaluran ZIS non-tunai.

Pada pilar edukasi dan sosialisasi, sinergi penyelenggaraan rangkaian kegiatan Fesyar dan ISEF pada tahun 2022 diperkuat sehingga makin berkontribusi nyata pada kemajuan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Festival Ekonomi Syariah (FESyar) 2022 diselenggarakan sebagai rangkaian kegiatan menjelang ISEF di tiga wilayah, yakni Makassar untuk wilayah Timur Indonesia, Aceh untuk wilayah Sumatera, dan Surabaya untuk wilayah Jawa. Pelaksanaan ISEF ke-9 tahun 2022 ini juga diperkuat dengan 3 (tiga) penancangan kegiatan untuk memajukan ekonomi syariah nasional ke depan. *Pertama*, penancangan integrasi pengembangan *Global Halal Hub* (GHH) yang merupakan ekosistem sinergi untuk mempercepat pengembangan produk halal unggulan lokal berorientasi global sehingga mendukung upaya menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal terbesar di dunia. *Kedua*, penancangan Gerakan Akselerasi Sertifikasi Halal melalui sinergi erat antar pemangku kebijakan. *Ketiga*, penancangan In2MotionFest sebagai *event modest fashion* rujukan dunia sebagaimana dijelaskan di atas. Dengan sinergi yang erat antara Bank Indonesia dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), kementerian/lembaga terkait, dan mitra strategis lainnya, termasuk dari lembaga internasional seperti IsDB, UNDP, IILM, IFSB, dan World Zakat Waqf Forum, rangkaian kegiatan ISEF ke-9 tahun 2022 membuahkan hasil yang sangat menggembirakan. Rangkaian kegiatan FESyar dan ISEF tahun ini diikuti oleh lebih dari 560 ribu pengunjung dan 950 peserta, jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Gambar 3.8). Nilai transaksi selama Penyelenggaraan FESyar dan ISEF juga meningkat mencapai Rp27,6 triliun yang mencakup antara lain pembiayaan lembaga keuangan syariah, transaksi antar pelaku usaha (*business to business*), transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen (*business to customer*), dan ZISWAF. Untuk itu, Bank Indonesia mengapresiasi seluruh pihak yang telah bersama-sama mendukung kesuksesan penyelenggaraan FESyar dan ISEF 2022 dalam rangka memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah selengkapnyanya disajikan pada publikasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEKSI) 2022.

Gambar 3.8. Hasil Penyelenggaraan Rangkaian Kegiatan ISEF ke-9 Tahun 2022



Sumber: Bank Indonesia

Bank Indonesia juga terus bersinergi mendorong kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui penguatan daya saing UMKM sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi UMKM, pengembangan UMKM naik kelas terus diperkuat melalui 3 (tiga) strategi utama yaitu penguatan korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan pembiayaan. Kebijakan pengembangan UMKM tersebut bertujuan untuk mendukung kebijakan utama Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah melalui pengelolaan stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Penguatan korporatisasi UMKM ditujukan untuk meningkatkan skala ekonomi dari UMKM melalui pembentukan kelompok-kelompok yang didukung modal sosial yang kuat dan kelembagaan formal dan modern sehingga mendukung perbaikan efisiensi, akses pasar, dan juga akses keuangan UMKM, setidaknya melalui 3 (tiga) hal. Pertama, kolaborasi antar-UMKM, kolaborasi UMKM dengan usaha besar, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan. Kedua, korporatisasi kelompok subsisten yang rentan terhadap gejolak

negatif perekonomian dan memiliki akses terbatas pada layanan keuangan formal dan kesempatan ekonomi. Penguatan kelompok subsisten dilakukan melalui pilot project pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif di Provinsi Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah serta wilayah Solo dan Jambi. Penguatan kelompok subsisten tersebut dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan literasi dan akses keuangan masyarakat; pemberdayaan ekonomi melalui pemberian capacity building dan kerjasama/networking dengan berbagai pihak; penguatan local champion dan memperkuat kelembagaan; dan monitoring dan evaluasi melalui one-on-one discussion, laporan rutin, dan site visit. Strategi yang ditempuh pada pilot project tersebut menunjukkan hasil yang positif seperti yang tercermin pada naiknya kepemilikan rekening dan literasi, perkembangan usaha yang terlihat dari peningkatan income dan diversifikasi produk, serta penguatan kelembagaan. Kunci sukses program ini adalah pemilihan aktivitas yang sesuai dan bertahap, pendampingan yang kontinu, serta menerapkan strategic linkage dan people-centered approach. Ketiga, korporatisasi

UMKM konvensional dan syariah yang belum terlayani perbankan. Program ini menjangkau pengusaha ultra mikro, penerima dana filantropi, dan penerima atau anggota keluarga penerima manfaat program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Upaya peningkatan kapasitas UMKM difokuskan pada penguatan produktivitas melalui perluasan akses pasar serta inovasi dan digitalisasi proses bisnis sehingga mendorong perbaikan daya saing UMKM. Dalam upaya pengembangan UMKM *go export*, Bank Indonesia melaksanakan 2 (dua) strategi besar, yaitu *pull strategy (market driven)* dan *push strategy* (Gambar 3.9). *Pull strategy* ditempuh dengan pemanfaatan *market intelligence* untuk identifikasi potensi pasar dan persyaratan yang dibutuhkan, fasilitasi perdagangan, serta sinergi dengan *stakeholder* terkait. Di sisi *push strategy*, fasilitasi sertifikasi, kurasi produk agar memiliki standar kualitas yang tinggi, interkoneksi dengan rantai pasok global, serta peningkatan kapasitas dan kontinuitas produk juga terus didorong. Sementara itu, pengembangan UMKM *go digital* terus didorong melalui peningkatan adopsi teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, memperluas akses pasar UMKM baik nasional maupun global secara *online* maupun *offline*, mempermudah akses pembiayaan UMKM, dan mempermudah transaksi UMKM sebagai *entry point* ke dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital antara lain melalui perluasan adopsi QRIS. Di samping itu, Bank Indonesia juga terus mendorong pengembangan UMKM hijau. Termasuk melalui

pengembangan model bisnis UMKM hijau dan adopsi praktik-praktik kegiatan usaha UMKM yang ramah lingkungan mulai dari penggunaan bahan baku, penerapan ekonomi sirkular, serta efisiensi penggunaan energi.

Perluasan akses pembiayaan UMKM yang lebih sehat terus didorong untuk mendukung ekspansi usaha. Sejalan dengan kebijakan pemerintah mendorong peningkatan kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30% pada 2024, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kebijakan RPIM. Implementasi tersebut meliputi pengembangan model bisnis *multiple channel financing (MCF)*, *business matching* pembiayaan, Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan UMKM (SIAPIK), *Database* UMKM Potensial Dibiayai (BISAID), serta perluasan pemanfaatan QRIS. Sampai dengan triwulan III-2022, SIAPIK telah dimanfaatkan oleh 22.335 pengguna atau meningkat 25% dibanding 2021. Dari pengguna tersebut, sebanyak 848 UMKM telah memperoleh pembiayaan dari perbankan dengan total Rp 26 miliar. Dengan berbagai penguatan tersebut, UMKM di harapkan menjadi makin *bankable* sehingga memudahkan akses pembiayaannya ke lembaga keuangan formal.

Berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing UMKM diperkuat oleh sinergi erat dengan kementerian, lembaga, asosiasi, dan komunitas sebagai kunci pengembangan UMKM. Pengembangan kelompok subsisten untuk meningkatkan inklusi keuangan juga dilaksanakan

Gambar 3.9. Strategi Pengembangan UMKM Berorientasi Ekspor



Sumber: Bank Indonesia

bersinergi dengan akademisi, *non-governmental organization* (NGO), Pemerintah Daerah, lembaga keuangan, dan industri. Sinergi untuk meningkatkan daya saing UMKM dilakukan dengan mendorong penguatan kapasitas UMKM *go export* dan *go digital*, peningkatan akses pembiayaan, dan peningkatan akses pemasaran melalui berbagai pameran di level nasional dan promosi perdagangan internasional. Dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia juga secara konsisten mendukung Gernas BBI dan Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja (BWI) di seluruh Indonesia melalui kontribusi aktif seluruh kantor Bank Indonesia, antara lain melalui program belanja produk-produk UMKM secara *hybrid* dan perluasan penggunaan QRIS UMKM di berbagai *event* strategis Bank Indonesia, dan kurasi produk melalui program *harvesting* (Gambar 3.10). Gernas BBI menunjukkan perlunya mendorong kolaborasi program antar Kementerian/Lembaga yang lebih bervariasi sesuai kebutuhan UMKM. Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga disesuaikan dengan kearifan lokal, memperkuat kontribusi implementasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PPDN), dan penerapan prinsip ekonomi hijau (Gambar 3.11).

Sinergi erat Bank Indonesia dengan kementerian/ lembaga, asosiasi, dan komunitas juga ditempuh dalam menyukseskan penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2022 sebagai momentum kebangkitan UMKM pascapandemi. KKI 2022,

diselenggarakan secara *hybrid* setelah selama dua tahun sebelumnya dilaksanakan secara virtual, dengan mengambil tema “UMKM Indonesia Bangkit melalui Digitalisasi dan Globalisasi Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan”. Tema ini mengandung 3 (tiga) kata kunci, yakni sinergi, digitalisasi, dan globalisasi yang direpresentasikan dengan tagar #BersamaUMKMBangkit dan #UMKMgodigital_goglobal. Dalam KKI ini, Bank Indonesia bersama 13 (tiga belas) kementerian/ lembaga, 5 (lima) asosiasi, 26 (dua puluh enam) pelaku industri, dunia perbankan, pelaku sistem pembayaran, *marketplace*, *aggregator* ekspor, dan desainer bersinergi untuk membangkitkan UMKM Indonesia sehingga mendukung pemulihan ekonomi Indonesia. Digitalisasi UMKM juga didorong melalui penggunaan QRIS, agar UMKM Indonesia tidak hanya menjadi pemain andal tingkat nasional namun juga tingkat global. Melalui kerja sama erat untuk mewujudkan komitmen bersama mendorong UMKM Indonesia naik kelas tersebut, pelaksanaan KKI 2022 mencatat kinerja yang sangat menggembirakan. Kinerja dari sisi omzet yang meningkat 6%, jumlah peserta UMKM naik 49%, dan komitmen yang tercipta dari *business matching* penjualan dalam negeri dan transaksi ekspor meningkat 36% dibandingkan 2021. Sinergi menaikkan kelas UMKM juga dilakukan melalui keterhubungan dengan rantai pasok industri yang juga sejalan dengan program Pemerintah untuk mengikutsertakan industri kecil dan menengah (IKM) sebagai penyedia dalam proyek BUMN.

Gambar 3.10. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja (BWI)



Sumber: Bank Indonesia, Kemenkomarves, Kemenparekraf

Gambar 3.11. Hasil Penyelenggaraan Gernas BBI

OUTCOME	Business Matching Ekspor Rp230,12 miliar	3 Terbesar: Jember (Co Host): Rp171 M NTB (WSBK): Rp11,3 M Babel (GBBI): Rp8,40 M	NEGARA TUJUAN Jember: Amerika NTB: AS, Korsel, Vietnam Babel: Singapura & Malaysia	KOMODITAS Jember: Kopi NTB: Vanili, Kopi, rumput laut, sarang burung walet Babel: Kain, Kerajinan, Mamin Olahhan	JUMLAH UMKM Jember: 1 NTB: 4 Babel: 5
	Business Matching Pembiayaan Rp3,21 triliun	3 Terbesar Sulsel (GBBI): Rp12,16T Maluku (Mangurebe): Rp678,6M Kalbar (GBBI): Rp200M	BANK PENYALUR: Sulsel : 4 bank (Mandiri, BTN, BNI, BRI) Maluku : 4 bank (BRI, Mandiri, BNI, BSI) Kalbar : 3 bank (Mandiri, BRI, BNI)	JUMLAH UMKM Sulsel: 51.130 Maluku :17.873 Kalbar: 58	
	Business Matching Penjualan Dalam Negeri Rp110,28 miliar	3 Terbesar: P. Siantar (SSCF): Rp48,69 M Jabar (CoE): Rp29,74 M Sulbar (GBBI): Rp13,10 M	KOMODITAS: Pematangsiantar: Kopi Jabar: Kopi Jambi: Kopi, Hortikultura	JUMLAH UMKM Pematangsiantar: 1 Jabar:32 Sulbar: 5	
	Transaksi Penjualan Ekspor Rp553,01 miliar	3 Terbesar: Kepri (GBBI): Rp522,04 M Sumut (KKSU): Rp10,13 M Jabar (CoE): Rp5,72 M	NEGARA TUJUAN Kepri: Singapura, china, Jepang, Belanda Sumut: Asia, Eropa, Amerika (9 negara) Jabar: Asia, Eropa, Amerika (11 negara)	KOMODITAS Jambi: Kopi, Kain, Kerajinan, Mamin Olahhan Sumut: Kopi	JUMLAH UMKM Kepri: 6 Sumut: 1 Jabar: 6
	Transaksi Exhibition Rp48,95 miliar	3 Terbesar : Jatim (JCC): Rp5,16 M DKI (Jakreatifest): Rp3,85 M Sumut (KKSU): Rp3,60 M	KOMODITAS: Jatim: Kopi DKI Jakarta: Kopi, Kain, Kerajinan, Mamin Sumut: Kopi, Kain, Kerajinan, Mamin, Herbal	JUMLAH UMKM DKI DKI Jakarta: 42 Sumut : 230 DIY: 255	
	Transaksi e-commerce Rp31,86 miliar	3 Terbesar: Jateng (Gayeng): Rp7,90 M Kepri (GBBI): Rp7,41 M Lampung (GBBI): Rp3,46 M	MEDIA Jateng: Marketplace (Bibli.com) Kepri : Marketplace Lampung: Marketplace	KOMODITAS Jateng : Kopi, Kain, Kerajinan, Mamin Kepri : Kopi, Kain, Kerajinan, Mamin Lampung: Kopi, Kain, Kerajinan, Mamin	JUMLAH UMKM Kepri : 250 Lampung : 60
OUTPUT	Partisipasi UMKM 72.712 UMKM di 46 KPwDN	3 Terbesar : Sulsel (GBBI): 55.928 UMKM Jambi (GBBI): 1.253 UMKM Jateng (Co Host Sulsel): 1.178 UMKM	UMKM Pengguna Baru QRIS 5.868 di 46 KPwDN	3 Terbesar : Sumut (KKSU): 1.487 UMKM Jambi (GBBI): 1.009 UMKM Aceh (KKA): 400 UMKM	
	Onboarding UMKM 4.725 UMKM oleh 46 KPwDN	3 Terbesar : Jambi (GBBI) : 1.044 UMKM Babel (GBBI): 400 UMKM Sulsel (GBBI): 324 UMKM	Jumlah Pengunjung 1.209.816 di 46 KPwDN	3 Terbesar : Sulsel (GBBI): 433.237 partisipan Malang (Techhibition): 101.222 partisipan Sulut (EUF): 67.141 partisipan	

Sumber: Bank Indonesia

Sinergi kebijakan dilakukan pula untuk mendorong peran UMKM dalam mendukung pengendalian inflasi pangan melalui GNPIP. Gerakan pengendalian inflasi pangan ini dilakukan secara terintegrasi, *end to end*, inovatif, dan berskala nasional, dengan mengedepankan pendekatan 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Program GNPIP di daerah telah diinisiasi oleh 43 (empat puluh tiga) kantor perwakilan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah, serta mitra strategis lainnya dalam wadah TPID. Kegiatan diimplementasikan antara lain melalui operasi pasar, *urban farming* dan *digital farming*, pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) dan sarana produksi pertanian (saprotan), subsidi transportasi, dan penguatan kerja sama antar daerah. Dengan dukungan seluruh pihak, gerakan nasional ini mampu mendukung terkendalinya inflasi kelompok pangan yang bergejolak pada Juli.

Sinergi dengan lembaga terkait di daerah, baik dari unsur pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan komunitas juga dilakukan melalui *pilot project* kelompok subsisten di 8 wilayah yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Kota

Solo, dan Kabupaten Jember. Target sasaran adalah usaha mikro subsisten yang mayoritas merupakan penerima bantuan sosial, mempunyai rintisan usaha, dan kaum perempuan. Selama pelaksanaan *pilot project*, Bank Indonesia melakukan fasilitasi pemberian bantuan teknis terdiri dari pelatihan, pendampingan, edukasi termasuk pengembangan diri setiap individu anggota kelompok. Sinergi juga dilakukan dengan World Bank, OJK dan Industri dalam rangka penyusunan materi edukasi terkait *Digital Financial Service (DFS)* dalam berbagai format media untuk masing-masing kelompok sasaran (Non DFS, *Passive DFS*, dan *Potential DFS user*). Materi edukasi untuk masing-masing kelompok sasaran disusun sesuai strategi edukasi yang meliputi (i) *Awareness*, membangun persepsi mengenai kebaruan dan kemudahan yang ditawarkan DFS, yaitu transaksi yang mudah dan nyaman; (ii) *Comprehension*, membangun pemahaman kegunaan dan keuntungan yang ditawarkan DFS sebagai inovasi yang memiliki banyak fungsi dan keuntungan; dan (iii) *Mitigation*, memberikan pengetahuan mengenai risiko dan bagaimana menghindari dan mengatasi kondisi yang tidak diinginkan.

3.6

Kebijakan Internasional

Kebijakan internasional Bank Indonesia terus dilakukan secara tersinergi dengan Pemerintah untuk mencapai stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, mendukung pemulihan ekonomi, serta memperjuangkan kepentingan Bank Indonesia dan ekonomi Indonesia. Di tengah peningkatan ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada tekanan pada sektor eksternal Indonesia, kerja sama internasional dan regional Asia terus diperkuat untuk mendukung daya tahan eksternal dan memperkuat pemulihan ekonomi. Dalam konteks ini, Bank Indonesia melanjutkan kerja sama internasional dalam rangka Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI) antara lain melalui *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA), *Local Currency Bilateral Swap Arrangement* (LCBSA), dan *Bilateral Swap Arrangement* dengan Korea Selatan, Malaysia, serta Tiongkok, Australia, Singapura, Malaysia, dan Jepang yang telah diperpanjang pada tahun ini. Bank Indonesia juga masih memiliki fasilitas *Repurchase Agreement* (repo) berupa kerja sama Foreign and International Monetary Authorities (FIMA) Repo dengan Federal Reserve New York, selain dengan sejumlah bank sentral atau International Organizations (IOs) lain yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan eksternal jika diperlukan. Selain itu, pada bulan Juni 2022, Bank Indonesia, Bank for International Settlement (BIS), dan beberapa bank sentral negara di kawasan Asia dan Pasifik juga telah menandatangani kerja sama Renminbi Liquidity Arrangement (RMBLA). Kerja sama ini menyediakan likuiditas melalui skema *reserve pool* sebagai salah satu penopang likuiditas yang dapat dimanfaatkan untuk stabilisasi pasar keuangan apabila diperlukan.

Bank Indonesia juga memperluas dan memperkuat implementasi kerja sama *Local Currency Settlement* (LCS). Mitra LCS Indonesia saat ini adalah Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok yang diperluas dengan Singapura melalui penandatanganan MOU kerja sama *Local Currency Transactions* (LCT) pada tahun 2022. Skema LCT merupakan inovasi

pengembangan LCS dengan memperluas cakupan kerja sama untuk mengakomodasi transaksi sistem pembayaran lintas negara (*cross-border payment*). Pengembangan LCT merupakan langkah antisipatif terhadap digitalisasi sistem pembayaran yang makin berkembang selain untuk mendorong penguatan konektivitas pembayaran di kawasan (*Regional Payment Connectivity*, RPC). Kerja sama ini akan mempermudah penyelesaian transaksi antara negara ASEAN-5 dalam mata uang lokal masing-masing negara, sehingga mendukung perdagangan dan investasi lintas negara di kawasan. Sinergi LCT dengan RPC sejalan dengan upaya G20 dan negara kawasan untuk melakukan diversifikasi mata uang, mengatasi potensi hambatan dalam kegiatan pembayaran lintas negara, mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, serta mendukung agenda prioritas ASEAN 2023 di bawah Ketetuaan Indonesia.

Bank Indonesia senantiasa berperan aktif dalam memperkuat persepsi positif internasional, khususnya lembaga pemeringkat dan investor asing, terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini dilakukan melalui komunikasi dan *engagement* dengan lembaga pemeringkat dan investor asing secara regular. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah *investor conference call* untuk mengkomunikasikan hasil keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan. Promosi investasi dan perdagangan juga terus dilakukan melalui *Investor Relation Unit* (IRU) baik nasional, daerah, dan global, melalui kantor perwakilan Bank Indonesia di dalam dan luar negeri. Koordinasi pelaksanaan promosi juga dilakukan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri. Selama tahun 2022, Bank Indonesia berpartisipasi aktif dalam kegiatan promosi investasi dan perdagangan termasuk pada US-Indonesia Investment Forum di New York, Indonesia Investment Forum di London, Expo 2020 Dubai di Dubai, dan Singapore International Jewelry Expo di Singapura. Konsistensi dalam melakukan komunikasi

dan *engagement* dengan lembaga pemeringkat dan investor serta promosi perdagangan dan investasi mampu mendukung terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi Indonesia yang kuat. Hal tersebut tecermin dari keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan peringkat rating dari 3 (tiga) lembaga pemeringkat utama dunia pada level *investment grade*, bahkan memperoleh peningkatan *outlook* menjadi stabil dari lembaga pemeringkat S&P.

Bank Indonesia juga terus memperkuat pengakuan internasional sebagai bank sentral terbaik di antara negara *emerging markets*. Hal ini dilakukan melalui peningkatan representasi Bank Indonesia, baik melalui *membership* maupun *chairmanship*, di berbagai forum kerja sama internasional. Peningkatan reputasi Bank Indonesia juga tecermin dari perolehan penghargaan dari lembaga internasional dengan reputasi tinggi, penerapan standar internasional, publikasi riset dan jurnal yang bertaraf internasional, maupun menjadi referensi dan narasumber dalam berbagai *event* internasional

strategis. Pada tahun 2022, Bank Indonesia meraih penghargaan internasional sebagai *Best Central Bank of the Year* dari *Global Islamic Finance Award (GIFA)*, *Contact Center World 2021 Global Top Ranking Performers* pada *15th Annual Next Generation Contact Center and Customer Engagement Conference*, dan penghargaan *Cyber Resilience Initiative* dari *Central Banking Publication*. Di samping itu, Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia dalam Presidensi G20 Indonesia telah memimpin negara-negara G20 untuk meyelesaikan pembahasan 6 (enam) agenda prioritas jalur keuangan dan menegaskan komitmen untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang meningkat, yang penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada Bab 6 – Presidensi G20 Indonesia: Sinergi Global Mendorong Pemulihan Ekonomi. Berbagai pencapaian tersebut tidak hanya mencerminkan pengakuan dunia atas keberhasilan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional, namun juga merupakan aksi nyata dalam mendukung pemulihan ekonomi domestik, termasuk melalui kebangkitan sektor pariwisata dan promosi produk-produk unggulan Indonesia yang makin mendunia.



3.7

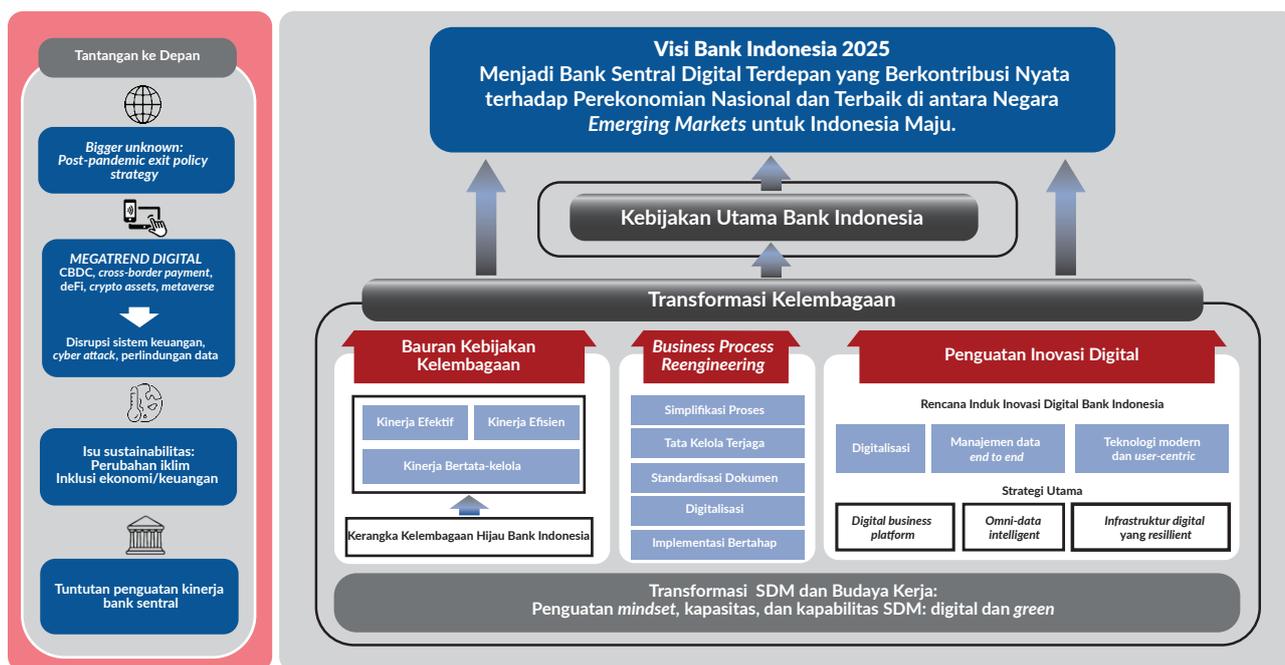
Kebijakan Transformasi Bank Indonesia

Transformasi menyeluruh Bank Indonesia yang ditempuh sejak 2018 terus diperluas, diperkuat, dan diakselerasi, baik transformasi kebijakan maupun transformasi kelembagaan, guna mewujudkan Visi Bank Indonesia 2025, menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata bagi perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju. Sejalan dengan perubahan cepat lingkungan strategis yang dihadapi, Bank Indonesia terus melakukan adaptasi transformasi kebijakan dan kelembagaan yang dituangkan dalam *Strategic Business Plan 2025*, termasuk dalam menyikapi pesatnya digitalisasi dan dampak dari perubahan iklim terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Transformasi kebijakan Bank Indonesia pada 2022 antara lain ditempuh dengan memperkuat Kerangka Bauran Kebijakan Utama (BKU) Bank Indonesia yang mengintegrasikan 3 (tiga) kebijakan utama, yakni kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, didukung oleh kebijakan pendukung meliputi kebijakan ekonomi daerah, kebijakan internasional, kebijakan layanan kebanksentralan, kebijakan data dan sistem informasi, serta kebijakan organisasi dan tata kelola. BKU Bank Indonesia tersebut ditujukan untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. BKU Bank Indonesia juga disinergikan dengan kebijakan nasional, termasuk melalui: (i) akselerasi transformasi sektor riil dan sektor keuangan; (ii) sinergi stimulus moneter, fiskal, makroprudensial, dan mikroprudensial; (iii) digitalisasi ekonomi dan keuangan; dan (iv) pengembangan ekonomi dan keuangan hijau. Selain itu, Transformasi sistem pembayaran dipercepat melalui implementasi BSPI 2025, termasuk inisiatif pengembangan Rupiah Digital sebagai *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang sah di Indonesia ke depannya. Terkait hal ini, Bank Indonesia telah menginisiasi “Proyek Garuda” melalui penerbitan *white paper* yang berisi dasar pemikiran dan peta jalan pengembangan Rupiah Digital untuk mendapatkan masukan dari

industri dan masyarakat. Penjelasan lebih lanjut terkait Rupiah Digital dapat dilihat pada Bab 5 Arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2023: Menjaga Stabilitas, Mendorong Akselerasi Pemulihan dan lebih terperinci pada Bab 7 Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Rupiah Digital. Di samping itu, transformasi pendalaman pasar uang juga terus dilanjutkan melalui implementasi *Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025* guna mewujudkan pasar uang yang modern dan maju. Sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah terus diperkuat baik melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk mengelola perekonomian jangka pendek maupun akselerasi reformasi struktural guna memperkuat struktur perekonomian Indonesia. Penguatan sinergi Bank Indonesia dengan pemangku kebijakan lain dalam KSSK juga terus dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan dunia usaha guna mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19. Selain itu, sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah, KSSK serta industri perbankan dan sistem pembayaran juga terus diperluas untuk mengakselerasi pendalaman pasar keuangan dan integrasi ekonomi keuangan digital secara nasional.

Transformasi kelembagaan terus diperkuat untuk mendukung implementasi kebijakan utama dan mewujudkan visi Bank Indonesia 2025. Transformasi kelembagaan difokuskan pada 3 (tiga) area strategis (Gambar 3.12). *Pertama*, penguatan Kerangka Bauran Kebijakan Kelembagaan (BKK) berbasis kinerja efektif, efisien, dan bertata-kelola/*governed* (2EG) yang telah dimulai sejak 2021 guna mendukung pencapaian dan pelaksanaan mandat Bank Indonesia secara kredibel. Kerangka BKK juga diperkuat Kerangka Kelembagaan Hijau Bank Indonesia yang merupakan wujud nyata peran Bank Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan ramah lingkungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia (*lead by example*). Pengembangan Kerangka Kelembagaan Hijau difokuskan pada 4 (empat) area, yaitu: (i) manajemen strategis dan tata kelola untuk memastikan pelaksanaan inisiatif hijau yang lebih komprehensif dan terintegrasi dengan keseluruhan

Gambar 3.12. Transformasi Kelembagaan Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia

strategi dan tata kelola di berbagai area serta fungsi Bank Indonesia; (ii) keuangan intern yang mencakup pengelolaan keuangan intern Bank Indonesia agar selaras dengan prinsip keuangan hijau; (iii) sarana dan prasarana untuk memastikan transisi bertahap aset fisik dan aset sistem informasi, termasuk proses pengadaannya, agar lebih sejalan dengan prinsip hijau; dan (iv) sumber daya manusia dengan sasaran utama mewujudkan sumber daya manusia Bank Indonesia yang memiliki *mindset*, kapasitas, dan kapabilitas hijau.

Kedua, *business process re-engineering* (BPR) berbasis digital guna mewujudkan organisasi dengan proses bisnis dan proses kerja yang lebih sederhana, ringkas dan standar, didukung teknologi digital dengan tetap memenuhi aspek tata kelola. BPR dilakukan melalui penyesuaian aspek pelaku, proses, dan teknologi untuk mendukung pelaksanaan proses bisnis Bank Indonesia yang lebih efisien dengan pendekatan “*One Input, One Process, Multi Purposes*”.

Penguatan ditempuh berdasarkan 5 (lima) prinsip utama, yakni: (i) simplifikasi proses; (ii) tata kelola terjaga; (iii) standardisasi dokumen; (iv) digitalisasi; dan (v) implementasi bertahap. Pada tahap awal, Bank Indonesia telah menempuh BPR untuk proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Simplifikasi proses pengambilan keputusan tentunya dilakukan dengan tetap menjaga efektivitas dan kualitas hasil. Tata kelola dijaga melalui kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pengambilan keputusan, serta memastikan mekanisme kontrol (*check and balances*) yang jelas dalam proses pengambilan keputusan. Standardisasi dokumen dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan tata kelola pengambilan keputusan dan proses komunikasi dalam perumusan kebijakan. Proses pengambilan keputusan juga didukung *Digital Workplace Platform* (DWP) yang dikembangkan sebagai *super app* yang *end-to-end* sehingga memungkinkan kolaborasi pekerjaan dalam platform yang terintegrasi secara *seamless*. Implementasi



BPR berbasis digital dilakukan bertahap dan akan terus diperluas guna mewujudkan organisasi dengan proses bisnis yang *streamlined* dan proses kerja yang *agile* dan sejalan dengan kebutuhan di era digital.

Ketiga, penguatan inovasi digital melalui implementasi Rencana Induk Inovasi Digital Bank Indonesia (RIVIBI) 2025. Dalam konteks ini, Bank Indonesia menempuh strategi yang difokuskan pada pengembangan pusat data dan digitalisasi berbasis BPR untuk mendukung kebijakan terkini, serta penguatan pada area teknologi dan pengamanan,

dengan 3 (tiga) area strategis, yakni digitalisasi, manajemen data *end-to-end*, serta teknologi modern dan *user-centric*. Ini dilakukan dengan tiga strategi utama mencakup (i) *digital business platform* yang mendukung kebijakan dan kelembagaan, (ii) *omni-data intelligent*, dan (iii) infrastruktur digital yang *resilient*. Berbagai pengembangan area strategis sebagai upaya transformasi kelembagaan tersebut tentu saja juga didukung dengan penguatan transformasi sumber daya manusia (SDM) untuk menciptakan SDM berkinerja unggul dengan *mindset*, kapasitas, dan kapabilitas digital.

Uang Rupiah Tahun Emisi 2022

Bank Indonesia secara inovatif menerbitkan uang baru Tahun Emisi (TE) 2022 untuk meningkatkan kualitas uang Rupiah. Bertepatan dengan perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Bank Indonesia mengeluarkan uang baru TE 2022 yang merupakan wujud semangat kebangsaan, nasionalisme, dan kedaulatan untuk menumbuhkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi nasional. Pecahan uang TE 2022 terdiri atas pecahan uang Rupiah kertas Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000. Uang Rupiah TE 2022 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 2022.

Pahlawan Nasional dan Tema Uang Rupiah

Gambar pahlawan nasional menjadi gambar utama pada uang Rupiah TE 2022. Sesuai dengan amanat UU Mata Uang, uang Rupiah harus mencantumkan gambar pahlawan nasional sebagai gambar utama bagian depan mata uang. Pencantuman gambar pahlawan nasional tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan dan mengukuhkan NKRI. Pencantuman gambar pahlawan juga diharapkan dapat lebih memperkenalkan pahlawan nasional kepada masyarakat sehingga dapat menumbuhkembangkan semangat dan sikap keteladanan pahlawan nasional. Dalam penentuan pahlawan yang dimuat dalam uang Rupiah, Bank Indonesia berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, sejarawan, akademisi, dan tokoh masyarakat. Seluruh gambar pahlawan nasional yang dicantumkan pada uang Rupiah diperoleh dari instansi yang berwenang menatausahakan pahlawan nasional dan disetujui oleh ahli waris pahlawan nasional.

Uang Rupiah TE 2022 sarat makna kebangsaan yang menampilkan kebinekaan dan keluhuran budaya bangsa. Pada sisi depan, uang Rupiah TE 2022 menampilkan lambang negara Garuda

Pancasila, frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), peta wilayah NKRI, serta gambar pahlawan nasional yang menegaskan uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI sekaligus simbol kedaulatan negara. Pada sisi belakang, uang Rupiah TE 2022 menampilkan keragaman budaya tarian asli Indonesia, kekayaan dan keindahan alam dari penjuru Aceh hingga Papua, keragaman flora endemik, serta keragaman motif kain nusantara dan rumah adat khas Indonesia.

Pengeluaran uang Rupiah kertas TE 2022 menjadikan uang Rupiah makin berkualitas dan terpercaya sehingga masyarakat menjadi makin aman, nyaman, dan bangga menggunakan uang Rupiah sebagai alat transaksi. Pengeluaran uang Rupiah TE 2022 juga dimaksudkan untuk menjaga reputasi uang Rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati. Selembang uang Rupiah menjadi miniatur Indonesia yang menampilkan kebinekaan dan keragaman budaya bangsa. Tidak hanya menjadi mata uang, uang Rupiah juga menjadi “Jendela Indonesia” dalam bentuk selembang mata uang.

Inovasi Uang Rupiah TE 2022

Bank Indonesia mengedepankan inovasi desain agar uang Rupiah makin mudah dikenali, makin sulit dipalsukan, serta memiliki masa edar lebih lama. Terdapat 3 (tiga) inovasi penerbitan uang baru Tahun Emisi (TE) 2022, yakni (i) desain warna yang lebih *colorful*, tajam, dan kontras serta mudah dikenali, (ii) unsur pengaman (*security features*) yang lebih aman dan sulit dipalsukan, serta (iii) bahan uang yang lebih kuat agar uang Rupiah makin Indah, aman, dan Tahan lama (INTAN)-(Gambar 1). Pada aspek desain, penguatan dilakukan Bank Indonesia melalui peningkatan ketajaman gambar dan kontras warna antarpecahan uang, penyeragaman gambar tanda air (*watermark*) sehingga sama dengan gambar utama pahlawan nasional. Selain itu, penguatan desain juga dilakukan melalui standardisasi desain dan tata letak unsur pengaman pada seluruh pecahan uang, serta

meningkatkan selisih ukuran panjang antarpecahan uang dari 2 (dua) mm menjadi 5 (lima) mm agar makin mudah dikenali khususnya bagi para penyandang tunanetra.

Bank Indonesia meningkatkan teknologi yang digunakan pada unsur pengaman dan bahan uang.

Pada aspek unsur pengaman, Bank Indonesia menggunakan benang pengaman teknologi terkini (*microlenses*) pada pecahan besar, memperkuat unsur pengaman *Ultra Violet* (UV), serta menggunakan teknologi tinta berubah warna dengan menambahkan fitur *magnetic ink* yang memiliki efek gerak dinamis *Optically Variable Magnetic Ink* (OVMI). Pada aspek bahan uang, Bank Indonesia menyeragamkan berat gramatur dan tebal kertas pada seluruh pecahan uang, serta menggunakan teknologi *coating* pada pecahan kecil Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000 agar uang Rupiah memiliki kualitas bahan yang lebih kuat dan membuat masa edar menjadi lebih lama. Hal tersebut dilakukan mengingat uang pecahan kecil lebih sering digunakan dan beredar di masyarakat dalam transaksi jual beli secara tunai. Berbagai inovasi dan penguatan pada uang Rupiah TE 2022

diharapkan dapat mempertahankan reputasi Rupiah di dunia internasional yang telah terjaga dengan sangat baik sebagaimana Uang Rupiah Khusus Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pecahan 75.000 (UPK 75 RI) yang pada tahun 2022 dinobatkan sebagai finalis *best new commemorative currency award* oleh International Association of Currency Affairs (IACA).

Pengeluaran uang Rupiah kertas TE 2022 ini makin memperkuat pengedaran uang Rupiah sebagai bentuk layanan kas yang makin prima kepada masyarakat. Pengeluaran dan pengedaran uang Rupiah TE 2022 menjadi salah satu wujud pelaksanaan tahapan Pengelolaan Uang Rupiah sebagaimana amanat UU Mata Uang untuk menyediakan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya. Dengan dikeluarkannya uang Rupiah kertas TE 2022, uang Rupiah beredar saat ini baik dalam bentuk kertas maupun logam yang telah dikeluarkan sebelumnya tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran oleh Bank Indonesia.

Gambar 1. Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022

